

Katalog BPS : 5311.53



# Hasil Survei

## Rumah Tangga Peternakan Nasional

# 2007

## Provinsi Nusa Tenggara Timur



**URAIAN KEGIATAN DAN ANALISIS HASIL**



Kerjasama  
Badan Pusat Statistik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
dengan

Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ajl memb 08-04-08



**HASIL SURVEI  
RUMAH TANGGA  
PETERNAKAN NASIONAL  
2007**

**PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

<http://mtt.bps.go.id>

# **HASIL SURVEI RUMAH TANGGA PETERNAKAN NASIONAL 2007 (SPN07) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

---

ISBN : -  
No.Publikasi : 53531.0706  
Katalog BPS : 5311.53

Ukuran Buku : 16,5 cm x 21,5 cm  
Jumlah Halaman : 70 + x

Editor : Ir. Poltak Sutrisno Siahaan  
Ir. Marselina I. Goetha

Penulis : Ir. Tutik Endari  
Ir. Dikson Balukh

Pengolah Data : M. Situmorang, SE  
Saulus Godlief Manapa

Penerbit:  
**Badan Pusat Statistik Provinsi NTT**  
Jl. R. Suprpto, No. 5 Kupang

***Boleh Dikutip Dengan Menyebutkan Sumbernya***



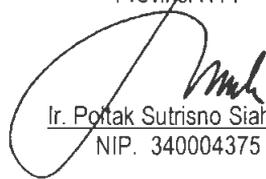
## KATA PENGANTAR

Publikasi ini menyajikan hasil Survei Rumah tangga Peternakan Nasional 2007 (SPN07). Informasi pokok yang disajikan mencakup Parameter Populasi dan Produksi Ternak, Ternak menurut Umur dan Jenis Kelamin, Tingkat Produktivitas Ternak Betina, Rumpun Ternak, Inseminasi, Pendapatan Ternak, dan Sarana.

Kegiatan SPN07 merupakan kerjasama Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian dengan BPS. Pelaksanaan survei dilakukan pada bulan Juli 2007 yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan utama dari SPN07 adalah memperbaiki metode estimasi populasi dan produksi ternak yang dikuasai rumah tangga serta untuk mendapatkan parameter dalam penghitungan estimasi populasi dan produksi ternak.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga kegiatan SPN07 dapat berjalan dengan baik, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saran guna perbaikan dari pengguna data sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Kupang, Nopember 2007  
w Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi NTT

  
Ir. Potak Sutrisno Siahaan  
NIP. 340004375

## KATA PENGANTAR

Survei Rumah tangga Peternakan Nasional 2007 (SPN07) merupakan kegiatan kerjasama Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian dengan Badan Pusat Statistik. Pelaksanaan survei dilakukan pada bulan Juli 2007 yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan utama dari SPN07 adalah untuk memperbaiki Metode Estimasi Populasi dan Produksi Ternak yang dikuasai rumah tangga serta untuk mendapatkan parameter dalam penghitungan Estimasi Populasi dan Produksi Ternak. SPN07 merupakan langkah awal untuk data peternakan dalam Perstatistikan Nasional, yaitu mulai melakukan penghitungan Populasi dan Produksi berdasarkan hasil survei rumah tangga.

Buku ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga apa yang tersaji dalam buku ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan para pengguna data dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

Kupang, Nopember 2007  
Kepala Dinas Peternakan  
Provinsi NTT

Ir. Yacobus Christian Leyloh, M.Si  
NIP. 620 016 450

## Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2007 Abstraksi

Salah satu target pembangunan di sektor peternakan adalah meningkatkan produksi peternakan serta pendapatan yang berasal dari peternakan. Saat ini kebutuhan protein hewani yang berasal dari temak baru mencapai 5,34 gram per kapita per hari, dari yang seharusnya 6 gram per kapita per hari (Standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 1998). Untuk itu sangat diperlukan perbaikan perencanaan pembangunan peternakan yang didasari oleh kualitas data populasi dan produksi yang akurat dan *mutakhir*.

Perangkat untuk mendapatkan data estimasi populasi dan produksi adalah dengan menggunakan parameter populasi dan produksi. Untuk memperbaiki metode estimasi populasi dan produksi temak yang dikuasai rumah tangga serta mendapatkan parameter populasi dan parameter produksi yang *mutakhir*, maka pada tahun 2007 dilaksanakan Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2007 (SPN07). SPN07 dilaksanakan pada Bulan Juli 2007 di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 75.000 rumah tangga usaha peternakan secara nasional dan untuk NTT sebanyak 2.580 rumah tangga usaha peternakan.

Komoditas yang dicakup dalam SPN07 meliputi 14 (empat belas) jenis temak yaitu: Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kuda, Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik/Itik Manila, Kelinci, Merpati, dan Burung Puyuh.

Hasil Pencacahan Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2007 adalah parameter mutasi yaitu persentase mutasi terhadap stok awal. Parameter ini dapat digunakan untuk mengestimasi populasi. Parameter mencakup penjualan, pemotongan, kematian, pengurangan lain, pembelian, kelahiran, dan penambahan lain dilengkapi dengan *Standard Error (SE)* dan *Relative Standard Error (RSE)*. Selain itu juga parameter persentase betina produktif dan produktivitas temak yang digunakan untuk melakukan estimasi produksi telur dan susu.

Data yang akurat, *mutakhir* dan berkelanjutan, akan sangat bermanfaat bagi pemangku keper-tingan (*stakeholder*) dalam melakukan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan peternakan khususnya peternakan yang dikelola rumah tangga.

**Estimasi Parameter Mutasi Ternak dan Standard Error serta  
Relative Standard Error-nya  
Hasil Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2007**

**Estimasi Parameter Mutasi Ternak dan Standard Error serta Relative Standard Error-nya  
Hasil Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2007 Pengolahan Putaran Pertama**

Jenis Ternak	Keterangan	Penjualan	Pemotongan	Kematian	Pengurangan Lain	Pembelian	Kelahiran/ Penetasan	Penambahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sapi Potong	Estimasi Parameter	0,3013	0,0134	0,0155	0,0163	0,2078	0,2717	0,0225
	SE	0,0219	0,0035	0,0015	0,0027	0,0247	0,0098	0,0021
	RSE	7,27	26,27	9,78	16,79	11,89	3,6	9,24
Sapi Perah	Estimasi Parameter	0,3993	0,0014	0,0112	0,0229	0,1423	0,3763	0,0231
	SE	0,0596	0,0014	0,0034	0,0075	0,0478	0,0273	0,0118
	RSE	14,94	100,08	29,96	32,64	33,62	7,27	50,99
Kerbau	Estimasi Parameter	0,1395	0,0184	0,0332	0,0147	0,0515	0,2322	0,0258
	SE	0,0086	0,0051	0,0069	0,0030	0,0077	0,0139	0,0062
	RSE	6,19	27,72	20,69	20,47	14,93	5,96	23,89
Kambing	Estimasi Parameter	0,3393	0,0223	0,0782	0,0223	0,1522	0,5073	0,0109
	SE	0,0281	0,0027	0,0097	0,0066	0,0336	0,0251	0,0019
	RSE	8,29	12,25	12,42	29,7	22,1	4,94	17,33
Domba	Estimasi Parameter	0,3143	0,0227	0,0829	0,0228	0,0483	0,4757	0,0216
	SE	0,0268	0,0045	0,0134	0,0072	0,0131	0,0521	0,0068
	RSE	8,52	19,73	16,16	31,54	27,16	10,95	31,43
Babi	Estimasi Parameter	0,4330	0,1257	0,2530	0,0625	0,2273	0,7905	0,0469
	SE	0,0141	0,0064	0,0142	0,0052	0,0136	0,0313	0,0047
	RSE	3,27	5,11	5,62	8,27	5,96	3,96	9,99

Jenis Ternak	Keterangan	Penjualan	Pemotongan	Kematian	Pengurangan Lain	Pembelian	Kelahiran/ Penetasan	Penambahan Lain
Kuda	Estimasi Parameter	0,0974	0,0228	0,0271	0,0324	0,0330	0,1840	0,0172
	SE	0,0127	0,0183	0,0115	0,0059	0,0217	0,0170	0,0061
	RSE	13,08	79,97	42,47	18,22	65,59	9,26	35,72
Ayam Buras	Estimasi Parameter	0,3057	0,0847	0,1800	0,0205	0,0288	0,7373	0,0232
	SE	0,0141	0,0052	0,0175	0,0027	0,0094	0,0379	0,0081
	RSE	4,61	6,09	9,74	13,23	32,57	5,15	34,9
Ayam Ras Petelur	Estimasi Parameter	0,1511	0,0016	0,0618	0,0015	0,2406	0,0043	0,0002
	SE	0,0467	0,0008	0,0080	0,0008	0,0532	0,0021	0,0001
	RSE	30,9	47,92	12,99	56,74	22,11	49,17	66,56
Ayam Ras Pedaging	Estimasi Parameter	0,1301	0,0000	0,0000	0,0000	0,1301	0,0000	0,0000
	SE	0,1092	0,0000	0,0000	0,0000	0,1092	0,0000	0,0000
	RSE	83,89	-	-	-	83,89	-	-
Itik/ Itik Manila	Estimasi Parameter	0,4634	0,0375	0,1412	0,0311	0,6446	0,2379	0,0282
	SE	0,0596	0,0076	0,0231	0,0068	0,0998	0,0508	0,0148
	RSE	12,87	20,32	16,35	21,94	15,48	21,37	52,68
Kelinci	Estimasi Parameter	1,2150	0,0185	0,0839	0,0180	0,0335	1,1201	0,0020
	SE	0,1143	0,0340	0,0675	0,0151	0,0544	0,2272	0,0059
	RSE	9,41	183,4	80,36	83,67	162,21	20,29	301,77
Merpati	Estimasi Parameter	0,4408	0,0546	0,1872	0,0486	0,0199	1,1478	0,0000
	SE	0,2146	0,0365	0,0419	0,0379	0,0804	0,2736	0,0919
	RSE	48,69	66,9	22,36	77,91	403,1	23,84	-
Burung Puyuh	Estimasi Parameter	1,1466	0,0237	0,1369	0,3071	0,3214	1,1546	0,0070
	SE	0,4298	0,0180	0,0411	0,2168	0,1103	0,6287	0,0052
	RSE	37,48	75,89	30	70,6	34,34	54,45	74,31

## Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Abstraksi	iii
Estimasi Parameter Mutasi Temak	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	2
Tujuan	2
Ruang Lingkup dan Cakupan Data	2
Organisasi Lapangan	3
Tahap Kegiatan	7
Pengolahan Data	10
<b>Bab II. Metodologi</b>	<b>12</b>
Kerangka Contoh Induk Pertanian (KCI-Tan)	12
Rancangan Penarikan Sampel	17
Prosedur Estimasi	18
Konsep dan Definisi	20
<b>Bab III. Hasil dan Analisis</b>	<b>26</b>
Rumah Tangga Usaha Peternakan	26
Salah Satu Parameter Produksi: Temak Betina Dewasa	28
Parameter Temak	29
Produktivitas Ternak	32
Informasi Lainnya	34
<b>Bab IV. Kesimpulan dan Saran</b>	<b>36</b>
Kesimpulan	36
Saran	38
<b>Tabel-tabel Lampiran</b>	<b>39</b>



## Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Prosedur Penghitungan Fraksi Sampling Strata $h$ sub sektor $s$	18
Tabel 3.1.	Parameter Pemotongan Ternak	32
Tabel 3.2.	Produktivitas Ternak yang Diusahakan Rumah Tangga Peternakan di Provinsi NTT Tahun 2007	34

<https://ntt.bps.go.id>



## Daftar Gambar

Gambar 2.1. Skema Pembentukan Blok Sensus Konsentrasi	14
Gambar 3.1. Jumlah Rumah Tangga Peternakan di NTT menurut Jenis Ternak Yang Diusahakan Tahun 2007	27
Gambar 3.2. Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan menurut Banyaknya Jenis Ternak yang Diusahakan	28



# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Salah satu target pembangunan di sektor peternakan adalah meningkatkan produksi peternakan serta pendapatan yang berasal dari peternakan. Saat ini kebutuhan protein hewani yang berasal dari ternak baru mencapai 5,34 gram per kapita per hari, dari yang seharusnya 6 gram per kapita per hari (Standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 1998). Selain itu produk peternakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan status gizi dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu sangat diperlukan perbaikan perencanaan pembangunan peternakan yang didasari oleh kualitas data populasi dan produksi yang akurat dan mutakhir.

Perangkat untuk mendapatkan data estimasi populasi dan produksi adalah dengan menggunakan parameter populasi dan produksi. Penghitungan populasi dan produksi ternak selama ini dilakukan Direktorat Jenderal Peternakan dan Dinas Peternakan Daerah dengan cara melakukan kompilasi laporan dari tingkat kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pelaporan data peternakan yang selama ini dilakukan, sudah tidak seperti yang diharapkan. Untuk memperbaiki metode estimasi populasi dan produksi ternak yang dikuasai rumah tangga serta mendapatkan parameter populasi dan parameter produksi yang mutakhir, maka pada tahun 2007 dilaksanakan Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2007 (SPN07).

Mengingat pentingnya data yang dicakup dalam SPN07 ini, diharapkan survei ini dapat dilaksanakan secara rutin dan ditingkatkan cakupan wilayahnya guna memperoleh data yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan, sehingga sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melakukan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan peternakan, khususnya peternakan yang dikelola rumah tangga.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Pelaksanaan Survei Rumah Tangga Peternakan 2007 (SPN07) adalah:

- a. Undang-Undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI NO. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Keputusan Presiden No.3 Tahun 2002 Jo. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- d. Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan, Pusat Data dan Informasi Pertanian Departemen Pertanian dengan Direktorat Statistik Pertanian BPS Nomor 113/Hk 130/F/F1/04.05, Nomor 10/LB.419/AG/04/05, Nomor 004/TV/KS Tahun 2005 tentang Pengembangan Statistik Peternakan.
- e. Perjanjian Kerjasama Kuasa Swakelola antara Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian dengan Direktorat Statistik Pertanian BPS, Nomor 206/PL.210/ F1/05/2007 dan Nomor 05.21.002/SPN tentang Kegiatan Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional Tahun 2007 (SPN07).

## 1.3 Tujuan Pelaksanaan SPN07

Tujuan utama dari SPN07 :

- a. Mendapatkan parameter dalam penghitungan estimasi populasi dan produksi ternak melalui survei rumah tangga peternakan.
- b. Memperbaiki metode estimasi populasi dan produksi ternak yang dikuasai rumah tangga.

## 1.4 Ruang Lingkup dan Cakupan Data

SPN07 dilaksanakan pada Bulan Juli 2007 di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 75.000 rumah tangga usaha peternakan, sementara di NTT jumlah sampel sebanyak 2.580 rumah tangga usaha peternakan.



Komoditas yang dicakup dalam SPN07 meliputi 14 (empat belas) jenis ternak yaitu :

- |                |                       |                      |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Sapi Potong | 6. Babi               | 11. Itik/Itik Manila |
| 2. Sapi Perah  | 7. Kuda               | 12. Kelinci          |
| 3. Kerbau      | 8. Ayam Buras         | 13. Merpati          |
| 4. Kambing     | 9. Ayam Ras Petelur   | 14. Burung Puyuh     |
| 5. Domba       | 10. Ayam Ras Pedaging |                      |

Jenis data yang dikumpulkan:

1. Tujuan utama pengusahaan ternak
2. Jumlah ternak menurut umur dan jenis kelamin
3. Jumlah ternak menurut golongan produktivitas
4. Jumlah ternak yang dilakukan inseminasi
5. Mutasi ternak selama setahun
6. Produksi ternak

### 1.5 Organisasi Lapangan

SPN07 merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan atas dasar perjanjian kerjasama Kuasa Swakelola antara Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian (Deptan) dengan Direktorat Statistik Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan kesepakatan kerjasama tersebut, pihak yang memberikan Kuasa Swakelola adalah Sekretariat Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian, penanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil Kerjasama Kuasa Swakelola SPN07 adalah Direktorat Statistik Pertanian, Badan Pusat Statistik. Tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat adalah sebagai berikut:

#### a. Pusat

Penanggung jawab pelaksanaan SPN07 di Pusat adalah Direktur Statistik Pertanian, dibantu oleh Kepala Subdit Statistik Peternakan dan Perikanan, Kepala Seksi dan staf yang terlibat. Sebagai penanggung jawab teknis dan administrasi adalah Direktur Statistik Pertanian. Direktur Statistik Pertanian mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :



1. Berkoordinasi dengan Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian dalam pelaksanaan SPN07 sesuai dengan surat perjanjian dan kerangka acuan kerja yang telah disepakati.
2. Memberi petunjuk kepada Kepala BPS Provinsi tentang penyelenggaraan SPN07 di tingkat Provinsi.
3. Melakukan pemantauan/pengawasan terhadap pelaksanaan SPN07.
4. Mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan SPN07.

#### **b. BPS Provinsi**

Penanggung jawab pelaksanaan SPN07 di Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dibantu oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan staf lainnya yang terlibat. Sebagai penanggung jawab teknis dan administrasi adalah Kepala Bidang Statistik Produksi.

Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi dalam pelaksanaan SPN07 di daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang digariskan.
2. Memberi petunjuk kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota tentang penyelenggaraan SPN07 di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Mengeluarkan Surat Tugas bagi petugas pencacah maupun pengawas.
4. Melakukan pemantauan/pengawasan terhadap pelaksanaan SPN07.
5. Mempertanggung jawabkan hasil penyelenggaraan SPN07.

#### **c. Kepala Bidang Statistik Produksi**

Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi mempunyai tugas membantu Kepala BPS Provinsi dalam hal teknis dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat rencana alokasi petugas per Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah blok sensus dan rumah tangga terpilih pencacahan SPN07.
2. Membuat rencana pelatihan petugas pencacah termasuk jadwal dan materi untuk pelatihan yang telah ditetapkan.

3. Membuat rencana alokasi dokumen dan perlengkapan petugas per Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah petugas, blok sensus dan rumah tangga terpilih.
4. Menyiapkan sketsa peta Blok Sensus terpilih SPN07 untuk digunakan oleh PCS dalam melakukan pendaftaran bangunan rumah tangga.
5. Memantau dan mengevaluasi penyalinan Rumah Tangga terpilih dari daftar SPN07-L ke dalam daftar sampel rumah tangga terpilih (SPN07-DSRT).
6. Memantau dan mengevaluasi pengolahan semua dokumen Daftar SPN06-L, dan Daftar SPN07-S.
7. Mengirimkan raw data hasil pengolahan sesuai jadwal ke BPS.
8. Membuat laporan kegiatan administrasi dan kegiatan akhir pelaksanaan SPN07

**d. Kepala BPS Kabupaten/Kota**

Penanggung jawab pelaksanaan SPN07 di kab/kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Kepala BPS Kabupaten/Kota secara umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh Kepala BPS Provinsi yang mencakup masalah rekrutmen petugas, penyelenggaraan pelatihan petugas, pemantauan dan pengawasan lapangan, pengolahan dan hal-hal lain sesuai yang ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan Kab/Kota.
3. Mendistribusikan dokumen ke petugas sesuai dengan prosedur dan alokasi yang telah ditetapkan.
4. Menyiapkan sketsa peta Blok Sensus terpilih SPN07 untuk digunakan oleh PCS dalam melakukan pendaftaran bangunan rumah tangga.
5. Membantu mengatur administrasi pelaksanaan SPN07.

6. Memantau dan mengevaluasi penyalinan Rumah Tangga terpilih dari daftar SPN07-L ke dalam daftar sampel rumah tangga terpilih (SPN07-DSRT).
7. Mengirimkan semua dokumen hasil pencacahan sesuai jadwal ke BPS Provinsi.
8. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SPN07 kepada Kepala BPS Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala BPS Kabupaten/Kota dibantu oleh Kepala Seksi dan staf lain yang terlibat.

**e. Petugas Pengawas/Pemeriksa (PMS)**

Pengawas/Pemeriksa (PMS) adalah staf BPS Provinsi atau Kabupaten/Kota dan atau staf Dinas Peternakan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditunjuk. Tugas dan kewajiban Pengawas/Pemeriksa (PMS) adalah :

1. Mengikuti pelatihan petugas SPN07.
2. Mengatur pembagian tugas dan alokasi/distribusi dokumen untuk PCS yang di bawah pengawasannya.
3. Mengatasi masalah teknis yang disampaikan PCS.
4. Mengawasi pelaksanaan listing dan pencacahan rumah tangga sampel yang dilakukan oleh PCS.
5. Memeriksa isian Daftar SPN07-L yang telah diisi oleh PCS.
6. Melakukan penarikan sampel rumah tangga usaha peternakan berdasarkan Daftar SPN07-L yang telah diisi oleh PCS.
7. Menyalin sampel rumah tangga usaha peternakan terpilih ke dalam Daftar SPN07-DSRT, dan memberikannya kepada PCS di bawah pengawasannya.
8. Mengumpulkan Daftar SPN06-L, Daftar SPN07-DSRT, dan Daftar SPN07-S yang diisi oleh PCS.
9. Menyerahkan dokumen yang sudah diperiksa untuk setiap PCS yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPS Kabupaten/Kota.
10. Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.

## **f. Petugas Pencacah (PCS)**

Petugas pencacah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengikuti pelatihan petugas SPN07.
2. Melakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga dengan daftar SPN07-L.
3. Melakukan pencacahan rumah tangga usaha peternakan terpilih dengan Daftar SPN07-S.
4. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian hasil pencacahan.
5. Menyerahkan daftar yang telah diisi kepada PMS secara bertahap tanpa menunggu selesainya seluruh beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Membetulankan isian daftar yang dinyatakan salah, oleh PMS.
7. Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.

## **1.6. Tahap Kegiatan**

### **1.6.1. Persiapan**

Tahap persiapan meliputi Penetapan Nara Sumber, Tim Ahli, Tim Teknis dan Tim Administrasi; Penyusunan Metodologi, dan Penyusunan Daftar Isian (Kuesioner).

#### **a. Nara Sumber, Tim Ahli, Tim Teknis dan Tim Administrasi**

Sesuai MoU, Direktorat Statistik Pertanian bertanggung jawab dari segi teknis dan administrasi pelaksanaan SPN07. Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Direktur Statistik Pertanian menetapkan Nara Sumber, Tim Ahli, Tim Teknis dan Tim Administrasi. Nara Sumber dan Tim Ahli terdiri dari pakar statistik dan peternakan baik berasal dari BPS maupun Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian. Tugas Nara Sumber dan Tim Ahli adalah memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan SPN07, baik teknis maupun administrasi.



statistik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewawancarai responden. Mitra Statistik adalah petugas diluar pegawai BPS dengan syarat minimal berpendidikan SLTA dan berasal dari daerah setempat yang diharapkan mengenal wilayah kerjanya, bertanggungjawab, sanggup, dan lulus mengikuti pelatihan petugas. PMS adalah Kepala Seksi Kab/Kota atau staf BPS Kab/Kota yang ditunjuk. Jumlah petugas dari seluruh provinsi dalam pelaksanaan SPN07 sebanyak 2.738 orang terdiri dari 1.875 PCS dan 863 PMS. Seorang PMS membawahi 4 orang PCS dan bertugas untuk memeriksa hasil pencacahan yang dilakukan PCS. Seorang PCS mempunyai tugas mewawancarai responden pada kurang lebih 4 Blok Sensus terpilih.

### **1.6.2. Pelaksanaan Lapangan**

Alur pelaksanaan lapangan dalam kegiatan SPN07, adalah sebagai berikut:

#### **a. Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga (Listing)**

Pelaksanaan Listing dalam SPN07 dilakukan oleh PCS dengan cara melakukan pendaftaran terhadap seluruh bangunan dan rumah tangga dengan daftar SPN07-L pada Blok Sensus terpilih SPN07. Dari hasil listing diperoleh jumlah rumah tangga peternakan menurut jenis ternak, jumlah ternak yang dikuasai rumah tangga. Hasil listing digunakan sebagai kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga peternakan yang akan dicacah lebih lanjut tentang karakteristik ternaknya.

#### **b. Penyalinan Daftar SPN07-DSRT**

Setelah selesai melakukan Listing dalam satu Blok Sensus terpilih maka pada setiap Blok Sensus dilakukan penarikan sampel. Penarikan sampel dilakukan oleh PMS setelah dokumen diperiksa kewajaran dan kelengkapan isinya. Dari setiap Blok Sensus dipilih masing-masing sebanyak 10 rumah tangga usaha peternakan berdasarkan jenis ternak utama yang diusahakan rumah tangga.

### **c. Pencacahan**

Sebelum melakukan pencacahan PCS harus memiliki daftar SPN07-DSRT sebagai pedoman untuk mendatangi responden. Daftar SPN07-S digunakan untuk mencacah satu Rumah Tangga terpilih sesuai yang tercantum pada daftar SPN07-DSRT.

### **d. Pemeriksaan**

Setelah PCS menyerahkan hasil pencacahannya kepada PMS, PMS harus memeriksa kelengkapan dokumen, konsistensi isian, dan mengisi kode-kode yang diperlukan pada daftar. Apabila ditemui kesalahan, harus ditanyakan kembali kepada PCS, apabila diperlukan dapat dilakukan pencacahan ulang.

Arus dokumen dalam kegiatan SPN07, baik yang berasal dari PMS ke PCS maupun sebaliknya memerlukan kecermatan dan perhatian khusus. Oleh karena itu PMS dituntut harus mampu mengelola semua dokumen SPN07 yang menjadi tanggung jawabnya secara baik.

### **e. Kendala yang dihadapi**

Dalam pelaksanaan SPN07, terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik teknis maupun non teknis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pergantian Blok Sensus dikarenakan daerah yang sulit dijangkau, hal ini disebabkan tidak tersedianya biaya operasional daerah sulit.
- b. Target sampel Blok Sensus tidak terpenuhi.
- c. Non respon yang disebabkan oleh jawaban responden, yang umumnya tidak mempunyai catatan khusus untuk kegiatan usaha peternakan.

## **1.7 Pengolahan Data**

Dokumen hasil lapangan (Daftar SPN07-L, dan Daftar SPN07-S) selanjutnya dikirimkan ke BPS Kab/Kota, dan seterusnya dikirim BPS Provinsi untuk dilakukan entry data. Hasil entry data dikirimkan ke Direktorat Statistik Pertanian BPS untuk dilakukan pengolahan lanjutan.

Sebelum pengolahan data, dilakukan pelatihan petugas pengolah dengan materi pelatihan mulai dari receiving sampai dengan praktek aplikasi terhadap penggunaan program entri data.

Pengolahan data SPN07 juga mengikuti prosedur baku tahapan pengolahan data yaitu:

1. Receiving/penerimaan dokumen yaitu proses menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil pencacahan dengan target SPN07,
2. Batching yaitu proses mengelompokkan dokumen menjadi batch-batch,
3. Editing dan coding yaitu proses memeriksa, memberi kode, serta membetulkan isian dokumen apabila terdapat kesalahan dalam isian dokumen, agar keakuratan dan kepercayaan data terjaga,
4. Entri data yaitu proses pemasukan / perekaman data menggunakan komputer dengan program dan
5. Tabulasi yaitu membuat tabel-tabel yang akan disajikan dalam publikasi.

-----ooo0ooo-----



i : menyatakan blok sensus ( $i = 1, 2, \dots, K$ )  
 h : menyatakan jenis usaha peternakan/perunggasan ( $h = 1, 2, 3, \dots, 14$ )

1 : sapi perah	8 : ayam ras petelur
2 : sapi potong	9 : ayam buras
3 : kerbau	10: itik/itik manila
4 : kambing	11: kuda
5 : domba	12: Kelinci
6 : babi	13: Merpati
7 : ayam ras pedaging	14: Burung Puyuh

$N_{hi}$  : banyaknya usaha rumahtangga peternakan/ perunggasan h dalam blok sensus i

$A_h$  : jumlah blok sensus yang paling sedikit memuat satu usaha rumahtangga peternakan/perunggasan h

$N_h$  : jumlah usaha rumahtangga peternakan/perunggasan h

b) Proses Stratifikasi

i).  $N_{hi}=0$  untuk semua h, blok sensus tersebut langsung digolongkan sebagai strata non usaha

ii). Menghitung rata-rata banyaknya usaha rumahtangga peternakan/ perunggasan pada blok sensus usaha dengan rumus

$$B_h = \frac{N_h}{A_h}$$

iii). Menghitung indeks konsentrasi pada setiap blok sensus dan jenis usaha peternakan/ perunggasan dengan rumus

$$I_{hi} = \frac{N_{hi}}{B_h}$$

- iv). Membuat peringkat dari  $I_{ik}$  diantara seluruh  $I_{jk}$  ( $j = 1, 2, \dots, 14$ ) untuk seluruh blok sensus.
- $R_{jk} = 1$  untuk nilai  $I_{jk}$  terbesar pertama  
 $R_{jk} = 2$  untuk nilai  $I_{jk}$  terbesar kedua  
 ....  
*dst.*  
 $R_{jk} = 0$  untuk seluruh  $j$  dengan  $N_{jk}=0$ .
- v). Definisikan  $R_{1k} = i$  bersesuaian dengan subsektor untuk  $R_{jk}=1$  dalam blok sensus  $k$  dan  $R_{1k} = 0$  jika  $N_{jk}=0$
- vi). Definisikan  $R_{2k} = i$  bersesuaian dengan subsektor untuk  $R_{jk}=2$  dalam blok sensus  $k$  dan  $R_{2k} = 0$  jika  $N_{jk}=0$
- vii). Definisikan strata / substrata berdasarkan kombinasi dari  $R_{1k}$  dan  $R_{2k}$ .

Untuk lebih jelasnya, proses pembentukan blok sensus konsentrasi menurut subsektor secara skematis dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1 :**  
 Skema Pembentukan Blok Sensus Konsentrasi

BS	Jumlah Usaha ( $h=1,2,\dots,14$ )					Indeks Konsentrasi ( $I_{hi}$ )					$R_{1k}$	$R_{2k}$	Strata
	1	...	$h$	...	14	1	...	$h$	...	14			
1													
2													
...													
$K$	$N_{k1}$	....	$N_{kh}$	....	$N_{k14}$	$I_{k1}$	...	$I_{kh}$	...	$I_{k14}$			
...													
$K$													
$N_h$	$N_{.1}$	....	$N_{.h}$	....	$N_{.14}$								
$A_h$	$A_{.1}$	....	$A_{.h}$	....	$A_{.14}$								
$B_h$	$B_{.1}$	....	$B_{.h}$	....	$B_{.14}$								

Contoh :

- $R_{1k}=1$  dan  $R_{2k}=0$ , adalah kelompok blok sensus yang hanya mengandung rumahtangga usaha peternakan sapi perah
- $R_{1k}=1$  dan  $R_{2k}=2$ , adalah kelompok blok sensus yang peringkat pertama dari pada indeks konsentrasi terdapat pada usaha peternakan sapi perah, sedangkan peringkat keduanya terdapat pada usaha peternakan sapi potong.

c) Evaluasi

Proses stratifikasi yang telah dilakukan dengan prosedur yang tercantum pada butir (2.b) akan menghasilkan stratifikasi blok sensus awal yang harus dievaluasi sehingga menghasilkan kelompok-kelompok blok sensus yang lebih masuk akal. Prosedur evaluasi terhadap hasil stratifikasi awal adalah sebagai berikut :

- i). Untuk simplifikasi notasi dalam evaluasi terhadap hasil awal stratifikasi maka dilakukan perubahan notasi.

K : blok sensus

j : peringkat pertama indeks konsentrasi jenis ternak/unggas ( $j=1, 2, \dots, 14$ )

$j'$  : peringkat kedua indeks konsentrasi jenis ternak/unggas ( $j'=0, 1, 2, \dots, 14$ ). Untuk  $j'=0$  berarti blok sensus tersebut hanya memuat subsektor j.

$N'_{k(j,j')}$  : jumlah usaha rumahtangga jenis ternak j dalam substrata ( $j,j'$ )

$\bar{N}_j$  : rata-rata banyaknya usaha jenis ternak j dalam strata j

ii). Prosedur evaluasi

Untuk  $j'=0$

Bila  $N_{k(j,j)}^j < \bar{N}_j^j$ , maka  $j=15$ , artinya blok sensus i digolongkan dalam strata non konsentrasi.

Untuk  $j' \neq 0$

- Bila  $N_{k(j,j)}^j > \bar{N}_j^j$  dan  $N_{k(j,j)}^{j'} > \bar{N}_{j'}^{j'}$ , maka  $j=j$
- Bila  $N_{k(j,j)}^j < \bar{N}_j^j$  dan  $N_{k(j,j)}^{j'} > \bar{N}_{j'}^{j'}$ , maka  $j=j'$
- Bila  $N_{k(j,j)}^j < \bar{N}_j^j$  dan  $N_{k(j,j)}^{j'} < \bar{N}_{j'}^{j'}$ , maka  $j=15$

iii). Berdasarkan hasil evaluasi, selanjutnya setiap satu blok sensus hanya dikelaskan ke dalam salah satu kelas, yaitu :

- (a). Blok sensus konsentrasi usaha sapi perah
- (b). Blok sensus konsentrasi usaha sapi potong
- (c). Blok sensus konsentrasi usaha kerbau
- (d). Blok sensus konsentrasi usaha kambing
- (e). Blok sensus konsentrasi usaha domba
- (f). Blok sensus konsentrasi usaha babi
- (g). Blok sensus konsentrasi usaha ayam ras pedaging
- (h). Blok sensus konsentrasi usaha ayam ras petelur
- (i). Blok sensus konsentrasi usaha ayam buras
- (j). Blok sensus konsentrasi usaha itik/itik manila
- (k). Blok sensus konsentrasi usaha kuda
- (l). Blok sensus konsentrasi usaha kelinci
- (m). Blok sensus konsentrasi usaha merpati
- (n). Blok sensus konsentrasi usaha burung puyuh
- (o). Blok sensus nonkonsentrasi peternakan
- (p). Blok sensus nonusaha peternakan



### 2.3 Prosedur Estimasi

Sejalan dengan prosedur penarikan sampel yang digunakan, maka selanjutnya disusun fraksi sampling pada setiap tahapan penarikan sampel.

Prosedur penyusunan fraksi sampling pada masing-masing tahap pemilihan sampel seperti tercantum pada Tabel 1.

Tabel 2.1. Prosedur Penghitungan Fraksi Sampling Strata  $h$  subsektor  $s$

Tahap	Unit	Jumlah unit strata $h$		Metode Penarikan Sampel	Peluang	Fraksi sampling
		Kerangka Sampel	Sampel			
1	Blok Sensus	$N'_h$	$n_h$	pps-wr size $X_{hi}$	$\frac{X_{hi}}{X'_h}$	$n_h \frac{X_{hi}}{X'_h}$
2	Rumah Tangga	$M_{hi}$	$m$	sistematik	$\frac{1}{M_{hi}}$	$\frac{m}{M_{hi}}$

Estimasi total karakteristik  $T$  berdasarkan hasil pendaftaran rumah-tangga

Misalkan  $T_{hi}$  adalah nilai karakteristik  $T$  hasil pendaftaran rumahtangga pada blok sensus terpilih ke- $i$  dalam strata ke- $h$ . Estimasi total karakteristik  $T$  adalah

$$\hat{T} = F_0 \frac{X'_0}{n} \sum_h^L \sum_i^{n_h} \frac{T_{hi}}{X_{hi}} = \frac{X_0}{n} \sum_{h=1}^L \sum_{i=1}^{n_h} \frac{T_{hi}}{X_{hi}}$$

dan estimasi varians-nya adalah

$$v(\hat{T}) = \sum_h^L \frac{1}{n_h(n_h - 1)} \sum_{i=1}^{n_h} (\hat{T}_{hi}^* - \hat{T}_h)^2$$

dengan

$$\hat{T}_{hi}^* = X_0 \frac{T_{hi}}{X_{hi}} \quad \text{dan} \quad \hat{T}_h = \frac{X_0}{n_h} \sum_i \frac{T_{hi}}{X_{hi}}$$

Catatan :

- $\hat{T}$  = Estimasi total karakteristik t
- $F_0$  = Faktor pengali KCI-Tan
- $X_0$  = Jumlah rumahtangga usaha peternakan dalam propinsi ( $F_0 \times X_0'$ )
- $X_0'$  = Jumlah rumahtangga usaha peternakan dari KCI-Tan
- $T_{hi}$  = Nilai karakteristik T hasil pendaftaran rumahtangga usaha peternakan pada blok sensus terpilih ke  $i$  strata ke  $h$
- $X_{hi}$  = Jumlah rumahtangga usaha peternakan pada blok sensus terpilih ke  $i$  strata ke  $h$  dari KCI-Tan
- $n$  = Jumlah sampel blok sensus dalam satu propinsi
- $n_h$  = Jumlah sampel blok sensus dalam strata ke  $h$

Estimasi total karakteristik Y berdasarkan hasil pencacahan sampel rumahtangga

Misalkan  $Y_{hij}$  adalah nilai karakteristik  $Y$  hasil rumahtangga pada terpilih ke- $j$  pada blok sensus terpilih ke- $i$  dalam strata ke- $h$ . Estimasi total karakteristik  $T$  adalah

$$\hat{Y} = F_0 \frac{X_0'}{n} \sum_h \sum_i \frac{n_h}{X_{hi}} \frac{1}{m} \sum_j y_{hij} = \frac{X_0'}{n} \sum_{h=1}^L \sum_{i=1}^{n_h} \frac{M_{hi}}{X_{hi}} \bar{y}_{hi}$$

dan estimasi varians-nya adalah

$$v(\hat{Y}) = \sum_h \frac{1}{n_h(n_h - 1)} \sum_{i=1}^{n_h} (\hat{Y}_{hi}^* - \hat{Y}_h)^2$$

dengan  $\hat{Y}_{hi}^* = X_0 \frac{M_{hi}}{X_{hi}} \bar{y}_{hi}$  dan  $\hat{T}_h = \frac{X_0}{n_h} \sum_i \frac{M_{hi}}{X_{hi}} \bar{y}_{hi}$

Catatan:

- $\hat{Y}$  = Estimasi total karakteristik  $Y$
- $F_0$  = Faktor pengali KCI-Tan
- $X_0$  = Jumlah rumahtangga usaha peternakan dalam propinsi  
( $F_0 \times X_0'$ )
- $X_0'$  = Jumlah rumahtangga usaha peternakan dari KCI-Tan
- $y_{hij}$  = Nilai karakteristik  $y$  hasil pencacahan rumahtangga usaha peternakan ke  $j$  pada blok sensus terpilih ke  $i$  dan strata ke  $h$
- $M_{hi}$  = Jumlah rumahtangga usaha peternakan hasil listing pada blok sensus terpilih ke  $i$  strata ke  $h$
- $X_{hi}$  = Jumlah rumahtangga usaha peternakan pada blok sensus terpilih ke  $i$  strata ke  $h$  dari KCI-Tan
- $m$  = Jumlah sampel rumahtangga dalam satu blok sensus
- $n$  = Jumlah sampel blok sensus dalam satu propinsi
- $n_h$  = Jumlah sampel blok sensus dalam strata ke  $h$

## 2.4 Konsep dan Definisi

**Anggota rumah tangga** adalah semua orang yang bergabung dalam satu kesatuan rumah tangga, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Tamu yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang telah tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan atau lebih, dianggap sebagai anggota rumah tangga.



Pembantu rumah tangga/sopir yang tinggal dan makan di rumah majikannya, dianggap sebagai anggota rumah tangga. Sebaliknya jika pembantu rumah tangga/ sopir yang hanya makan di rumah majikannya, ia dianggap sebagai anggota di mana ia bertempat tinggal.

**Rumah tangga pemelihara ternak** adalah rumah tangga yang melakukan pemeliharaan ternak.

**Rumah tangga usaha peternakan** adalah rumah tangga pemelihara ternak yang memiliki jumlah yang diusahakan lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU) untuk masing-masing jenis ternak.

**Usaha peternakan** adalah kegiatan memelihara ternak dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/memperoleh keuntungan atas resiko usaha.

**Peternak** adalah seseorang melakukan pemeliharaan ternak dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual/memperoleh keuntungan atas resiko usaha.

**Ternak kebiri** adalah ternak yang di disfungsi alat reproduksinya, sehingga tidak mungkin lagi dapat memberikan atau mendapatkan keturunan/anak.

**Penggolongan umur ternak** adalah sebagai berikut:

**a. Ternak Besar**

1. **Anak ternak** adalah ternak yang berumur kurang dari satu (1) tahun.
2. **Ternak muda** adalah ternak yang berumur 1-2 tahun dan belum pernah kawin/beranak.
3. **Ternak dewasa/tua** adalah ternak yang berumur  $> 2$  tahun, atau belum berumur 2 tahun tetapi sudah kawin atau beranak.

Yang termasuk ternak besar adalah kerbau, kuda, sapi potong, dan sapi perah.

## **b. Ternak Kecil**

1. **Anak ternak** adalah ternak yang berumur kurang dari 6 bulan.
2. **Ternak muda** adalah ternak yang berumur 6-12 bulan dan belum kawin/beranak.
3. **Ternak dewasa/tua** adalah ternak yang berumur > 12 bulan atau belum berumur 12 bulan tetapi sudah kawin atau beranak.

Yang termasuk ternak kecil adalah kambing, domba, babi.

## **c. Unggas**

1. **Anak** adalah unggas yang berumur kurang dari satu bulan
2. **Muda** adalah unggas yang berumur 1-5 bulan dan belum memproduksi (bertelur)
3. **Dewasa** adalah unggas yang berumur > 5 bulan

Yang termasuk unggas adalah ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan itik/itik manila.

## **d. Kelinci**

1. **Anak** adalah kelinci yang berumur kurang dari dua bulan
2. **Muda** adalah kelinci yang berumur 2-4 bulan
3. **Dewasa** adalah kelinci yang berumur > 4 bulan

## **e. Merpati**

1. **Anak** adalah merpati yang berumur kurang dari satu bulan
2. **Muda** adalah merpati yang berumur 1-4 bulan
3. **Dewasa** adalah merpati yang berumur > 4 bulan

## **f. Burung puyuh**

1. **Anak (Burung puyuh starter)** : berumur kurang dari tiga minggu
2. **Muda (Burung Puyuh grower)** : berumur 3-6 minggu
3. **Dewasa (Burung Puyuh layer)** : berumur > 6 minggu

### **Golongan Produktivitas :**

- a. **Ternak/unggas belum berproduksi**, adalah ternak/unggas yang sampai dengan pada saat pencacahan belum pernah memberikan hasil meskipun sudah cukup umur.
- b. **Ternak/unggas sedang berproduksi**, adalah ternak/unggas yang pada saat pencacahan sedang berproduksi.
- c. **Ternak/unggas sedang dalam keadaan kering/rontok bulu**, adalah ternak/unggas yang sebelum saat pencacahan pernah berproduksi dan masih akan berproduksi tetapi pada saat pencacahan sedang tidak berproduksi.
- d. **Ternak/unggas tidak berproduksi lagi**, adalah ternak/unggas yang pernah berproduksi , tetapi pada saat pencacahan tidak berproduksi dan tidak akan pernah berproduksi lagi dimasa yang akan datang, misalnya sakit, afkir.

**Kawin suntik/Inseminasi Buatan (IB)** adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah di proses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut "*Insemination gun*".

**Ternak betina produktif** adalah ternak yang tidak mandul/tidak majir

**Dipotong** adalah pemotongan ternak baik untuk tujuan dikonsumsi sendiri maupun dijual sebagian atau seluruhnya.

**Kematian** adalah kematian ternak karena sakit atau kecelakaan seperti ditabrak kendaraan, terbenam, dimakan binatang buas, dan dimusnahkan. Mati karena dipotong/disembelih tidak termasuk dalam kategori mati, tetapi termasuk kategori pemotongan.

**Pengurangan lain** adalah pengurangan ternak yang disebabkan oleh:

1. Ternak yang diberikan kepada pihak lain sebagai bantuan, hibah atau bagi hasil.
2. Penyerahan kembali ternak yang dibagikan kepada pemilik.
3. Ternak hilang karena dicuri atau sebab lain.

**Kelahiran/Penetasan** adalah lahir/menetas hidup, yaitu ternak yang dilahirkan/ditetaskan menunjukkan tanda-tanda kehidupan antara lain: jantung berdenyut, bernafas, dan bergerak. Kelahiran tetap dicatat, walaupun pada saat pencacahan anak maupun induknya sudah tidak ada lagi (karena dijual, dipotong, dll).

**Penambahan lain** adalah penambahan ternak selain penambahan diatas selama setahun yang lalu, misalnya:

1. Ternak yang diterima dari pihak lain sebagai bantuan, hibah, bagi hasil (digaduhkan).
2. Penerimaan dari pengembalian ternak bagi hasil.
3. Ternak yang ditemukan.

**RPH (Rumah Potong Hewan)** adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat.

**TPH (Tempat Pemotongan Hewan)** adalah tempat pemotongan hewan sementara, yang merupakan kegiatan pelayanan pemotongan hewan untuk keperluan pembinaan kesehatan masyarakat, veteriner oleh Dinas Peternakan setempat (Dinas Tingkat II).

**Keurmaster** adalah tenaga paramedik pemerintah yang telah mengikuti pelatihan tentang uji daging, dan bertugas di Rumah Potong Hewan (RPH), serta ditunjuk oleh Dinas Peternakan atas nama bupati/walikota yang selanjutnya memiliki kewenangan untuk melaksanakan uji daging.

Tugas Keurmaster adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan dokumen hewan, pengawasan perlakuan hewan saat penerimaan dan pengistirahatan, dan pemeriksaan kesehatan hewan (ante mortem)
- Pengawasan teknis penyembelihan, pengulitan, pengeluaran jeroan, dan pemeriksaan post mortem.
- Pengawasan kebersihan ruang produksi, peralatan, higiene personal, penanganan karkas, dan pelaporan.

**Jagal** adalah orang yang biasanya bertugas menyembelih/memotong hewan.

**Setahun yang lalu** adalah waktu yang dihitung setahun mundur satu hari dari saat pencacahan (misal pencacahan tanggal 3 Juli 2007, maka setahun yang lalu dihitung dari 3 Juni 2006 - 2 Juli 2007)

-----0000000-----

<https://ntt.bps.go.id>

### 3. HASIL DAN ANALISIS

SPN07 merupakan tindak lanjut dalam penyempurnaan hasil-hasil yang diperoleh pada survei sebelumnya (SPN06).

SPN07 bertujuan untuk mendapatkan parameter populasi dan produksi dari ternak yang dikuasai rumah tangga. Dalam SPN07 yang dimaksud dengan parameter adalah karakteristik obyek berupa ringkasan data yang diperoleh dari data sampel. Parameter yang disajikan berupa rata-rata dan proporsi. Untuk parameter mutasi adalah proporsi, sedangkan parameter produksi adalah rata-rata.

Selain parameter dalam SPN07 disajikan pula:

1. Karakteristik rumah tangga peternakan yang digambarkan dengan banyaknya jumlah ternak.
2. Karakteristik ternak yang disajikan menurut umur ternak, jenis kelamin ternak, tingkat produktivitas ternak betina.
3. Faktor-faktor lain yang menunjang peningkatan populasi dan produksi, diantaranya inseminasi.

Analisis yang digunakan dalam SPN07 adalah analisis deskriptif.

Dalam publikasi ini disajikan juga estimasi kesalahan sampling untuk parameter populasi. Penyajian estimasi kesalahan sampling (*sampling error*) disusun bukan untuk melakukan koreksi terhadap hasil estimasi. Penyajian ini ditujukan untuk memberi gambaran seberapa jauh presisi data hasil estimasi SPN07, sehingga pengguna data dapat menginterpretasikan data dengan lebih tepat. Penyajian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengguna data maupun untuk penyempurnaan kegiatan survei-survei di masa mendatang.

Angka estimasi rasio/proporsi terhadap stok awal dengan *standard error (SE)* dan *relative standard error (RSE)*.

#### 3.1 Rumah Tangga Usaha Peternakan

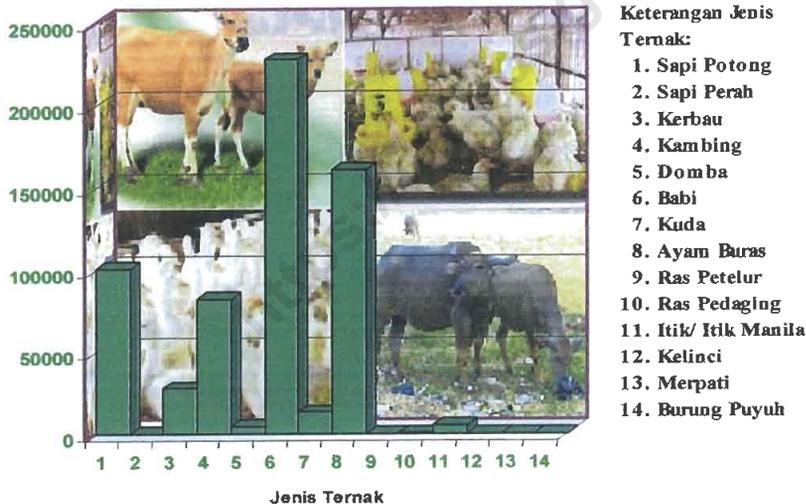
Jumlah rumah tangga usaha peternakan di Nusa Tenggara Timur (NTT) hasil SPN07 tercatat sebanyak 277.743 rumah tangga atau 4,2 persen dari total rumah tangga usaha peternakan di Indonesia.

*Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2007*

Dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian 2003 (ST03) jumlah rumah tangga usaha peternakan mengalami penurunan sebesar 1,6 persen yaitu dari 282.376 juta hasil ST03 menjadi 277.743 rumah tangga usaha peternakan.

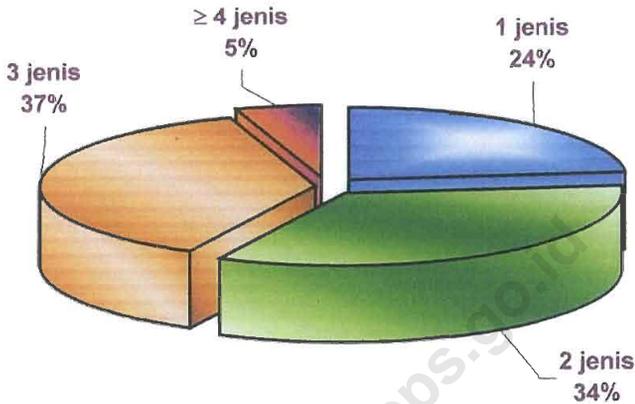
Rumah tangga usaha peternakan babi merupakan rumah tangga usaha dengan jumlah terbesar diikuti oleh rumah tangga usaha peternakan ayam buras, sapi potong dan kambing. Ini menunjukkan bahwa jenis ternak di atas termasuk jenis ternak unggulan karena merata di seluruh provinsi dengan jumlah rumah tangga usaha peternakan lebih banyak (Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Jumlah Rumah Tangga Peternakan di NTT menurut Jenis Ternak yang Diusahakan Tahun 2007



Jumlah rumah tangga usaha peternakan tidak sama dengan jumlah rumah tangga usaha peternakan per jenis ternak, disebabkan satu rumah tangga usaha peternakan dapat mengusahakan lebih dari satu jenis ternak. Dari rumah tangga usaha peternakan di NTT terbanyak mengusahakan tiga jenis ternak yaitu sebesar 37,3 persen, sedangkan rumah tangga yang mengusahakan ternak sampai empat jenis ternak hanya sebesar 5,10 persen (Gambar 3.2).

Gambar 3.2. Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan menurut Banyaknya Jenis Ternak yang Diusahakan



### 3.2 Salah Satu Parameter Produksi: Ternak Betina Dewasa

Ternak yang diusahakan rumah tangga sebagian besar telah berumur dewasa/tua, yang merupakan tingkat umur yang sesuai untuk berproduksi atau berkembang biak. Persentase ternak usia anak, muda, dewasa/tua cukup bervariasi. Secara umum jumlah ternak kategori dewasa/tua lebih besar dari ternak anak dan muda, kecuali ayam buras di mana perbandingan anak : muda : dewasa/tua adalah 2 : 1 : 1 yang memperlihatkan bahwa penambahan generasi (anak) sebanding dengan penurunan jumlah dewasa/tua.

Perbandingan persentase ternak besar menurut umur untuk sapi potong dan kerbau adalah 1 : 1 : 3, kuda 1 : 1 : 4. Sedangkan ternak kecil untuk kambing, domba maupun babi adalah 1 : 1 : 2. Perbandingan persentase itik/itik manila adalah 1 : 2 : 6.

Secara keseluruhan persentase ternak betina yang dikuasai rumah tangga lebih besar dibanding ternak jantan, walaupun perbandingan antara ternak jantan dengan ternak betina yang hampir sama, yaitu kira-kira 1 : 2 kecuali kerbau dengan perbandingan 1 : 3. Hal ini memperlihatkan bahwa untuk mempercepat produksi/perkembangbiakan

populasi ternak, dibutuhkan jumlah ternak betina yang lebih besar dibanding ternak jantan.

### 3.3 Parameter Ternak

Parameter adalah ringkasan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran terhadap seluruh anggota populasi. Bentuk parameter dapat berupa rata-rata ( $\mu$ ), proporsi ( $\pi$ ), median (Med), modus (Mod), varians ( $\sigma^2$ ), simpangan baku ( $\sigma$ ), dan sebagainya. Sedangkan ringkasan data yang diperoleh dari hasil penarikan sampel disebut statistik (*statistic*). Sebagaimana parameter bentuk statistik pun dapat berupa rata-rata ( $\bar{x}$ ), proporsi (p), median (Med), modus (Mod), varians ( $s^2$ ), simpangan baku (s), dan sebagainya. Idealnya, statistik yang diperoleh dari *sampling* sama dengan parameter. Sehingga, statistik dapat digunakan untuk mengestimasi parameter dengan tingkat keakuratan yang tinggi.

Dalam SPN07 ini, yang dimaksud dengan 'parameter' adalah karakteristik obyek berupa ringkasan data yang diperoleh dari data sampel. Parameter yang disajikan kebanyakan berupa rata-rata dan proporsi.

#### 3.3.1 Parameter Mutasi Ternak

Parameter mutasi ternak yang disajikan dari hasil SPN07 adalah proporsi misalnya parameter penjualan (*Sl*), parameter pemotongan (*Am*), parameter kematian (*Dt*), parameter pengurangan lain (*Rd*), parameter pembelian (*By*), parameter kelahiran/penetasan (*Br*), dan parameter penambahan lain (*Ad*). Parameter-parameter ini diperoleh dengan cara membuat persentase *raw data* terhadap jumlah ternak setahun yang lalu pada level nasional maupun level provinsi.

Manfaat utama dari parameter mutasi ternak yang dihasilkan adalah untuk membuat estimasi populasi pada kurun waktu yang akan datang. Disamping itu, dapat juga digunakan untuk membuat estimasi mutasi (sebaran) ternak pada tahun berikutnya. Rumus estimasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P_{t+1} = P_t (1 - Sl - Am - Dt - Rd + By + Br + Ad)$$

di mana:

$P_{t+1}$  = Populasi ternak tahun ke-(t+1)

$P_t$  = Populasi ternak tahun ke-t yakni populasi ternak pada saat pencacahan (t)

$Sl$  = parameter penjualan

$Am$  = parameter pemotongan

$Dt$  = parameter kematian

$Rd$  = parameter pengurangan lain

$By$  = parameter pembelian

$Br$  = parameter kelahiran atau penetasan

$Ad$  = parameter penambahan lain

Pada level nasional, parameter mutasi semua jenis ternak dapat dihitung nilainya kecuali parameter penambahan lain pada merpati. Parameter pemotongan dan penetasan ayam ras pedaging tidak dicari pada Survei Peternakan tahun 2007, hal ini dikarenakan parameter pemotongan ayam ras pedaging hasil SPN06 relatif kecil. Parameter penetasan tidak dicari karena semua rumah tangga yang mengusahakan ayam ras pedaging tidak melakukan penetasan telur sendiri tetapi membeli DOC dari perusahaan untuk dibesarkan. Parameter pembelian untuk ayam ras pedaging adalah 100 persen. Pada level provinsi, tidak semua parameter dapat diperoleh, dengan kata lain masih ada parameter usaha peternakan yang belum didapat. Hal ini terjadi karena target sampel yang digunakan relatif kecil, baik target sampel Blok Sensus (BS) maupun target sampel Rumah Tangga.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan parameter mutasi hasil SPN07:

- a. Angka ini hanya menggambarkan parameter ternak yang diusahakan Rumah Tangga tidak termasuk parameter ternak yang diusahakan perusahaan, dengan *reverensi waktu* pada saat pencacahan.
- b. Parameter kelahiran dan kematian di tingkat Rumah Tangga ini dapat mewakili parameter kelahiran dan kematian di suatu wilayah.

- c. Parameter penjualan dan pembelian hanya menggambarkan penjualan dan pembelian ternak yang dilakukan oleh Rumah Tangga, tidak menggambarkan parameter penjualan dan pembelian di suatu wilayah.
- d. Parameter pemotongan hanya menggambarkan pemotongan ternak yang dilakukan oleh Rumah Tangga, tidak menggambarkan parameter pemotongan di suatu wilayah.
- d. Parameter pemotongan di suatu wilayah adalah parameter pemotongan yang dihitung dari jumlah pemotongan ternak yang dicatat oleh petugas maupun pemotongan ternak yang tidak dicatat. Parameter pemotongan tercatat di suatu wilayah diperoleh dari registrasi rutin BPS yang dikumpulkan dari RPH dan Keurmater. Sedangkan parameter pemotongan tidak tercatat dapat diwakili oleh parameter pemotongan tidak tercatat hasil SPN07
- e. Parameter penambahan lain dan pengurangan lain tidak mewakili parameter penambahan lain dan pengurangan lain di suatu wilayah. Untuk menggambarkan kondisi di suatu wilayah, parameter ini perlu memperhitungkan faktor koreksi.

### **3.3.2 Parameter Pemotongan Ternak**

Angka yang mencolok dari parameter ternak, adalah perbandingan parameter pemotongan yang dilakukan di luar rumah potong hewan (RPH) dan di luar tempat pemotongan hewan (TPH) lebih besar dibanding parameter pemotongan yang dilakukan di RPH/TPH. Hasil survei ini, tidak ditemukan parameter pemotongan ternak kerbau, domba dan kuda di RPH/TPH.

Jika parameter ini benar-benar mencerminkan kondisi populasi, maka perlu kerja keras untuk memberikan penyuluhan kepada para peternak agar memotong ternaknya di RPH/TPH atau melaporkan kepada para petugas pencatat (keurmater). Sehingga dikemudian hari semua ternak yang dipotong diketahui oleh para petugas. Hal ini penting, untuk pemberian sertifikasi layak tidaknya ternak yang dipotong untuk konsumsi masyarakat.

**Tabel 3.1. Parameter Pemotongan Ternak**

Jenis Ternak	RPH/TPH	Di Luar RPH/TPH	
		Dilaporkan ke Keurmaster	Tidak Dilaporkan ke Keurmaster
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sapi Potong</b>	<b>0,25</b>	<b>0,15</b>	<b>0,76</b>
<b>Kerbau</b>	-	<b>0,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Kambing</b>	<b>0,21</b>	<b>0,05</b>	<b>5,56</b>
<b>Domba</b>	-	-	<b>1,46</b>
<b>Babi</b>	<b>0,32</b>	<b>0,40</b>	<b>8,93</b>
<b>Kuda</b>	-	-	<b>2,63</b>

### 3.3.3 Estimasi Populasi Ternak

Dengan menggunakan rumus

$$P_{t+1} = P_t (1 - Sl - Am - Dt - Rd + By + Br + Ad)$$

dan parameter SPN07, untuk semua jenis ternak tahun 2007 dan 2008 dapat diperkirakan jumlah populasinya, di mana  $P_t$  adalah populasi atau jumlah ternak pada tahun 2007.

### 3.4 Produktivitas Ternak

Produktivitas ternak mencerminkan kemampuan ternak per ekor dalam menghasilkan produksi per satuan waktu. Produktivitas SPN07 adalah terbatas pada ternak yang menghasilkan susu dan telur. Produktivitas beberapa ternak yang diusahakan rumah tangga peternakan disajikan pada Tabel 3.2, dimana untuk sapi perah produksinya adalah susu segar dalam satuan liter namun tidak diusahakan oleh rumah tangga peternakan di Provinsi NTT, sementara untuk ayam dan itik produksinya adalah telur.

**Tabel 3.2. Produktivitas Ternak yang Diusahakan Rumah Tangga Peternakan di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Ternak	Persentase Betina Produktif	Rata-rata Produksi/ekor/tahun (butir)	Rata-rata Jumlah telur per kg (butir)	Estimasi Populasi (000 ekor)	
				2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ayam Buras	21,28	37,97	19,97	9 742	9 752
Itik/Itik Manil	56,23	117,14	13,08	169	110

### 3.4.2 Produktivitas Itik/Itik Manila

Produktivitas itik yang disajikan adalah produktivitas per ekor dalam satu tahun. Produksi per ekor per tahun di NTT sebesar 117,14 butir (Tabel 3.2) sedangkan rata-rata nasional 167,67 butir.

Estimasi produksi untuk tahun 2007 dan 2008 (dengan perkiraan populasi pada tahun 2007 sebesar 169 ribu ekor dan tahun 2008 sebesar 110 ribu ekor serta proporsi betina produktif 56,2 persen) diperoleh produksi sebesar 851 ton pada tahun 2007 dan 554 ton pada tahun 2008.

## 3.5 Informasi Lainnya

### 3.5.1 Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan merupakan metode alternatif dalam mengembangkan ternak. Metode ini dinilai dapat mengurangi biaya produksi usaha peternakan karena peternak dapat memilih untuk hanya memelihara ternak betina saja dengan tanpa kehilangan kesempatan untuk memperbanyak ternaknya dengan cara pengembangbiakan.

Secara umum ternak yang dilakukan inseminasi buatan adalah sapi perah dan sapi potong. Secara nasional persentase keberhasilan

inseminasi buatan kedua jenis ternak tersebut adalah masing-masing 85,2 persen dan 84,0 persen. Persentase keberhasilan inseminasi buatan untuk ternak kerbau, kambing, domba, dan bab masing-masing adalah 50,4 persen; 44,1 persen; 90,9 persen; 84,0 persen. Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2007 di NTT tidak menemukan adanya perlakuan inseminasi buatan terhadap ternak pada rumah tangga usaha peternakan.

### **3.5.2 Tempat Penjualan Ternak**

Secara umum rata-rata persentase penjualan terhadap stok awal paling besar kepada pedagang ternak yang berada di dalam propinsi. Penjualan kepada pedagang ternak yang berada di dalam propinsi persentase terbesar terjadi pada jenis ternak ayam buras, yaitu sebesar 89,5 persen, sementara untuk luar propinsi persentase terbesar terjadi pada jenis ternak kambing yaitu sebesar 0,3 persen.

Pada ternak kerbau, persentase penjualan terhadap stock awal untuk peternak yang menjual ternaknya di dalam propinsi sebesar 30,3 persen, dengan rincian 21,9 persen dijual kepada pedagang (blantik) dan 8,4 persen dijual kepada pedagang lainnya. Sementara untuk ternak kuda secara rata-rata persentase penjualan terhadap stock awal pada peternak yang menjual ternaknya di dalam propinsi sebesar 7,8 persen.

Pada ternak sapi potong dan sapi perah, persentase penjualan terhadap stock awal pada penjualan dalam propinsi sebesar 15,1 persen.

Pada hewan ternak kecil (Babi, Domba, dan Kambing) persentase penjualan di dalam propinsi terhadap stok awal berturut-turut 54,4 persen; 7,5 persen dan 21,9 persen. Untuk ternak domba, persentase penjualan terhadap stock awal ini paling kecil dibandingkan dengan jenis ternak yang lain. Sementara itu pada ternak unggas, persentase penjualan terhadap stock awal paling besar terjadi pada ayam buras yaitu mencapai 183,5 persen. Hal ini berarti nilai penjualan telah melebihi stock awal.

### **3.5.3 Penyebab Kematian Ternak**

Penyebab kematian yang terjadi di rumah tangga, sebagian besar disebabkan penyakit mencapai 96,3 persen untuk ternak ayam ras pedaging. Ternak yang mengalami kematian karena bencana alam hanya sekitar 0,1 - 0,4 persen, tertinggi pada ayam buras. Persentase ternak yang mati dimusnahkan tertinggi mencapai 0,4 persen untuk itik.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

#### 4.1.1 Pelaksanaan SPN07

1. Keterbatasan Pelaksanaan SPN07, diantaranya adalah dari besaran sampel, cakupan wilayah dan komoditas ternak. SPN07 dengan jumlah sampel 2.580 rumah tangga tidak mencukupi untuk sepenuhnya melakukan estimasi pada tingkat provinsi. Besaran sampel itu pula yang mempengaruhi sampling error.
2. Besaran realisasi pemasukan dokumen terhadap target sampel sangat mempengaruhi besaran non sampling error.
3. Kendala lapangan yang dihadapi petugas dan muatan kuesioner yang terlalu beragam cukup berpengaruh terhadap beban kerja petugas.
4. Cakupan komoditas SPN07 yang terlalu beragam, tidak semuanya dapat diakomodasikan ke dalam sebaran Blok Sensus yang ada.

#### 4.1.2. Hasil SPN07

1. SPN07 merupakan kegiatan transisi dari pengumpulan data dengan metode kompilasi ke metode survei. Parameter yang dihasilkan dari SPN07 digunakan untuk melakukan estimasi populasi pada tahun berikutnya.
2. Populasi Tahun 2007 hasil estimasi menggunakan parameter SPN07, merupakan uji coba penghitungan populasi yang berguna untuk penyempurnaan tatacara maupun metodologi SPN07, dan hasilnya bukan merupakan data populasi 2007 yang definitif.
3. Parameter kelahiran dan kematian hasil SPN07 dapat mencerminkan parameter kelahiran dan kematian di suatu wilayah. Sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan estimasi populasi di suatu wilayah.
4. Parameter penambahan dan pengurangan hasil SPN07 tidak mencerminkan parameter penambahan dan pengurangan di suatu wilayah.

5. Parameter betina produktif dan produktivitas ternak hasil SPN07 mencerminkan parameter produksi di suatu wilayah, sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan estimasi telur dan susu.
6. Ternak yang diusahakan rumah tangga sebagian besar telah berumur dewasa/tua, dengan persentase ternak betina jauh lebih besar dibanding ternak jantan. Sekitar 99 persen dari ternak betina dewasa yang diusahakan oleh rumah tangga adalah ternak yang tidak mandul atau tidak majir.
7. Parameter mutasi pada level nasional nilainya dapat dihitung untuk semua jenis ternak kecuali parameter penetasan pada ternak ayam ras pedaging. Hal ini terjadi karena semua rumah tangga yang mengusahakan ayam ras pedaging tidak melakukan penetasan telur sendiri tetapi membeli DOC dari perusahaan untuk dibesarkan. Parameter pembelian untuk ayam ras pedaging adalah 100 persen.
8. Parameter pemotongan hanya menggambarkan pemotongan ternak yang dilakukan oleh rumah tangga, umumnya rumah tangga menjual ternak hidup bukan ternak potong. Hal ini tercermin dari parameter pemotongan yang dilakukan di luar RPH/TPH lebih besar dibanding parameter pemotongan yang dilakukan di RPH/TPH.
9. Parameter produksi telur ayam buras diperoleh dari kemampuan ayam bertelur yang diukur dalam rentang waktu masa bertelur (per siklus) dan dalam rentang waktu satu tahun. Rentang waktu masa bertelur (per siklus) diperoleh rata-rata per ekor berkisar 11,72 butir per siklusnya. Sedangkan jika dihitung produktivitas per ekor dalam kurun waktu satu tahun diperoleh nilai antara 37,97 butir dalam rentang waktu satu tahun.
11. Banyaknya jumlah siklus ayam buras dalam setahun tergolong kecil yaitu rata-rata 3,24 dengan rata-rata nasional sebesar 3,36 kali. Intensitas siklus yang rendah mengindikasikan bahwa tingkat pengusahaan ayam buras pada skala rumah tangga masih tradisional.
12. Rata-rata produksi telur itik per ekor per tahun 117,14 butir, dengan rata-rata nasional 167,67 butir.

## 4.2 Saran

1. Disarankan pelaksanaan SPN08 dan selanjutnya mempertimbangkan segala hambatan dan keterbatasan pada pelaksanaan SPN07, seperti besaran sampel, cakupan wilayah dan kendala lapangan, sehingga mampu menghasilkan estimasi populasi pada tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.
2. Kerjasama pelaksanaan SPN07 yang dilaksanakan di tingkat pusat antara Direktorat Jenderal Peternakan dengan Badan Pusat Statistik, dan kerjasama di tingkat daerah antara Dinas Daerah dengan BPS Provinsi sehingga diharapkan daerah lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap data yang dihasilkan.
3. Desentralisasi pelaksanaan SPN08 dan selanjutnya, juga dimaksudkan untuk pemberdayaan daerah dalam pengumpulan data statistik peternakan melalui survei.
4. Kerjasama pelaksanaan SPN hanya untuk usaha rumah tangga peternakan, sehingga untuk mendapatkan data wilayah, yang juga mencakup perusahaan peternakan, disarankan untuk dilakukan proses pengolahan untuk menggabungkan antara hasil SPN dengan hasil Survei Perusahaan Peternakan yang rutin dilakukan oleh BPS.
5. Estimasi populasi dan produksi yang dihasilkan dari SPN07 hanya mencerminkan populasi dan produksi peternakan dari rumah tangga peternakan. Dalam pemanfaatan data hasil SPN07 juga harus mempertimbangkan faktor koreksi yang ada di suatu wilayah, seperti populasi dari perusahaan dan lain-lain.

-----0000000-----

<https://ntps.go.id>

# **TABEL-TABEL LAMPIRAN**



**Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan menurut Jenis Ternak dan Tujuan Utama Pengusahaan di Provinsi NTT Tahun 2007**

Kode	Jenis Ternak	Tujuan Utama Pengusahaan			Jumlah
		1	2	3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
701	Kerbau	23 880	-	3 733	27 613
702	Kuda	12 220	-	762	12 982
703	Sapi Potong	76 295	-	24 591	100 886
704	Sapi Perah	-	-	-	-
705	Babi	186 188	-	41 440	227 628
706	Domba	4 250	-	117	4 367
707	Kambing	76 510	-	5 545	82 055
708	Kelinci	-	-	-	-
712	Ayam Buras	150 126	7 026	3 966	161 118
713	Ayam Ras Pedaging	-	-	-	-
714	Ayam Ras Petelur	-	-	-	-
715	Merpati	-	-	-	-
716	Burung Puyuh	-	-	-	-
717	Itik/Itik Manila	2 705	2 148	55	4 908

Keterangan: 1). Menghasilkan/memproduksi anak ternak/memperbanyak jumlah ternak  
 2). Menghasilkan/memproduksi telur  
 3). Penggemukan Ternak

**Tabel 2. Persentase Ternak yang Dikuasai menurut Jenis Ternak dan Jenis Kelamin di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Ternak	Anak				Muda			
	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sapi Potong	7,62	11,36	0,00	18,98	10,04	13,42	0,03	23,49
Sapi Perah	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerbau	9,79	11,33	0,00	21,12	8,40	9,41	0,00	17,81
Kambing	11,63	14,07	0,00	25,70	10,23	11,85	0,23	22,31
Domba	16,37	13,13	0,00	29,50	10,32	17,25	0,06	27,63
Babi	13,24	15,72	2,76	31,72	10,15	10,54	3,07	23,76
Kuda	8,68	12,78	0,00	21,46	6,65	7,86	0,30	14,81
Ayam Buras	16,88	24,14	-	41,02	10,67	16,24	-	26,91
Ayam Ras Petelur	-	-	-	-	-	-	-	-
Itik/Itik Manila	10,92	18,62	-	10,92	10,49	8,13	-	18,62
Kelinci	-	-	-	-	-	-	-	-
Merpati	-	-	-	-	-	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-	-	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 2.

Jenis Ternak	Dewasa/Tua				Total			
	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sapi Potong	20,73	36,76	0,04	57,53	38,39	61,54	0,07	100,00
Sapi Perah	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerbau	9,15	51,83	0,09	61,07	27,34	72,57	0,09	100,00
Kambing	14,85	34,02	3,12	51,99	36,71	59,94	3,35	100,00
Domba	15,35	25,02	2,50	42,87	42,04	55,40	2,56	100,00
Babi	11,93	27,76	4,83	44,52	35,32	54,02	10,66	100,00
Kuda	25,11	38,24	0,38	63,73	40,44	58,88	0,68	100,00
Ayam Buras	10,79	21,28	-	32,07	38,34	61,66	0,00	100,00
Ayam Ras Petelur	-	-	-	-	-	-	-	-
Itik/Itik Manila	14,23	56,23	-	70,46	35,64	64,36	0,00	100,00
Kelinci	-	-	-	-	-	-	-	-
Merpati	-	-	-	-	-	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel 3. Persentase Ternak Betina Usia Produktif terhadap Betina Dewasa yang Dikuasai Rumah Tangga Usaha Peternakan menurut Jenis Ternak dan Golongan Fertilitas di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Ternak	Golongan Fertilitas		Jumlah
	Tidak Mandul/ Tidak Majir	Mandul/Majir	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sapi Potong	100,00	-	100,00
Sapi Perah	-	-	-
Kerbau	100,00	-	100,00
Kambing	99,00	1,00	100,00
Domba	100,00	-	100,00
Babi	100,00	-	100,00
Kuda	99,63	0,37	100,00



**Tabel 4. Persentase Ternak Betina Produktif menurut Golongan Produktifitas di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Ternak	Belum Berproduksi	Sedang Berproduksi	Sedang dalam Keadaan Kering	Tidak Berproduksi Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sapi Perah	-	-	-	-
Ayam Buras	2,19	13,53	5,34	0,22
Ayam Ras Petelur	-	-	-	-
Itik/Itik Manila	4,65	42,97	8,61	-
Burung Puyuh	-	-	-	-

**Tabel 5. Persentase Mutasi Ternak Terhadap Stok Awal Selama Setahun yang Lalu Menurut Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Ternak	Penjualan	Pemotongan	Kematian	Pengurangan Lain	Pembelian	Kelahiran <sup>1)</sup>	Penambahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sapi Potong	15,28	1,16	0,01	5,44	4,83	21,86	1,90
Sapi Perah	-	-	-	-	-	-	-
Kerbau	30,46	1,24	0,30	0,67	7,56	20,41	7,80
Kambing	24,13	5,82	3,63	8,38	4,54	35,02	8,40
Domba	7,47	1,46	6,11	1,04	0,42	20,74	1,20
Babi	54,48	9,65	10,59	8,39	7,20	78,41	6,50
Kuda	7,98	2,63	9,38	6,47	3,03	17,35	6,10
Ayam Buras	183,48	33,66	44,34	15,56	3,78	270,38	2,90
Ayam Ras Petelur	-	-	-	-	-	-	-
Ayam Ras Pedaging <sup>2)</sup>	93,38	-	5,47	1,14	-	-	-
Itik/Itik Manila	31,65	10,81	27,60	16,55	0,14	50,87	0,80
Kelinci	-	-	-	-	-	-	-
Merpati	-	-	-	-	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: 1). untuk Unggas : Penetasan  
2). Mutasi terhadap Pembelian DOC

**Tabel 6. Estimasi Populasi Ternak Di Rumah Tangga Peternakan Menurut Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2007 Dan 2008**

Jenis Ternak	P <sub>0</sub>	Estimasi Populasi	
		2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)
Sapi Potong	544 484	581 128	620 238
Sapi Perah	-	-	-
Kerbau	142 257	146 681	151 243
Kambing	496 766	526 721	558 482
Domba	58 305	61 984	65 895
Babi	1 385 961	1 510 697	1 646 660
Kuda	77 356	77 371	77 387
Ayam Buras	9 732 275	9 742 007	9 751 749
Ayam Ras Petelur	-	-	-
Ayam Ras Pedaging	-	1 417 933	-
Itik/Itik Manila	259 568	169 238	110 343
Kelinci	-	-	-
Merpati	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-

**Tabel 7. Persentase Ternak Yang Dijual Terhadap Stok Awal Menurut Jenis Ternak dan Tujuan Penjualan di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Ternak	Dalam Provinsi			Luar Provinsi		
	Peda-gang	Lain-nya	Jumlah	Peda-gang	Lain-nya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Sapi Potong	7,63	7,47	15,12	0,12	0,04	0,16
Sapi Perah	-	-	-	-	-	-
Kerbau	21,89	8,44	30,33	0,13	-	0,13
Kambing	11,35	10,57	21,92	0,34	1,87	2,21
Domba	0,06	7,41	7,47	-	-	-
Babi	24,51	29,84	54,35	0,01	0,12	0,13
Kuda	1,25	6,60	7,85	0,13	-	0,13
Ayam Buras	89,48	94,00	183,48	-	-	-
Ayam Ras Petelur	-	-	-	-	-	-
Ayam Ras Pedaging	-	-	20,70	-	-	79,30
Itik/Itik Manila	3,44	28,21	31,65	-	-	-
Kelinci	-	-	-	-	-	-
Merpati	-	-	-	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-	-	-	-

**Tabel 8. Persentase Ternak Yang Dipotong Di RPH/TPH terhadap Stok Awal Menurut Jenis Ternak dan Jenis Kelamin di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Ternak	Jantan	Betina	
		Produktif	Tidak Produktif
(1)	(2)	(3)	(4)
Sapi Potong	0,25	-	-
Sapi Perah	-	-	-
Kerbau	-	-	-
Kambing	0,14	-	0,07
Domba	-	-	-
Babi	0,25	0,03	0,04
Kuda	-	-	-

**Tabel 9. Persentase Ternak Yang Dipotong Di Luar RPH/TPH Terhadap Stok Awal Menurut Jenis Ternak dan Jenis Kelamin di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Ternak	Dilaporkan ke Keurmaster			Tidak Dilaporkan ke Keurmaster		
	Jantan	Betina		Jantan	Betina	
		Produktif	Tidak Produktif		Produktif	Tidak Produktif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sapi Potong	0,04	0,06	0,05	0,44	0,18	0,14
Sapi Perah	-	-	-	-	-	-
Kerbau	0,12	-	-	1,00	-	0,12
Kambing	0,04	-	0,01	4,01	1,01	0,54
Domba	-	-	-	1,22	0,07	0,17
Babi	0,33	0,02	0,05	6,23	1,12	1,58
Kuda	-	-	-	1,71	0,60	0,32

**Tabel 10. Persentase Ternak Yang Mati Terhadap Stok Awal Menurut Jenis Ternak Dan Penyebab Kematian di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Ternak	Penyebab Kematian				Jumlah
	Penyakit	Bencana Alam	Dimusnahkan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sapi Potong	0,01	-	-	-	0,01
Sapi Perah	-	-	-	-	-
Kerbau	0,30	-	-	-	0,30
Kambing	3,32	0,10	-	0,21	3,63
Domba	5,94	-	-	0,17	6,11
Babi	8,88	0,16	-	1,55	10,59
Kuda	7,90	-	-	1,48	9,38
Ayam Buras	20,30	0,40	0,01	1,46	22,17
Ayam Ras Petelur	-	-	-	-	-
Ayam Ras Pedaging	96,26	-	0,17	3,57	100,00
Itik/Itik Manila	18,92	0,27	0,35	8,06	27,60
Kelinci	-	-	-	-	-
Merpati	-	-	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-	-	-

**Tabel 11. Persentase Ternak Yang Dibeli Terhadap Stok Awal Menurut Jenis Ternak dan Asal Pembelian**

Jenis Ternak	Dalam Provinsi			Luar Provinsi		
	Peda-gang	Lain-nya	Jumlah	Peda-gang	Lain-nya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Sapi Potong	0,79	4,04	4,83	-	-	-
Sapi Perah	-	-	-	-	-	-
Kerbau	6,18	1,38	7,56	-	-	-
Kambing	0,38	4,16	4,54	-	-	-
Domba	-	0,42	0,42	-	-	-
Babi	0,39	6,78	7,17	-	0,03	0,03
Kuda	0,51	2,52	3,03	-	-	-
Ayam Buras	0,72	3,02	3,74	0,04	-	0,04
Ayam Ras Petelur	-	-	-	-	-	-
Ayam Ras Pedaging	-	-	20,70	-	-	79,30
Itik/Itik Manila	-	0,14	0,14	-	-	-
Kelinci	-	-	-	-	-	-
Merpati	-	-	-	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-	-	-	-

**Tabel 12. Persentase Ternak Betina Dewasa Yang Bunting Dan Tidak Bunting terhadap Betina Dewasa Selama Setahun yang Lalu Menurut Jenis Ternak Dan Penyebab Kebuntingan di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Ternak	Dilakukan Inseminasi Buatan (IB)			Tidak Dilakukan Inseminasi Buatan (IB)	
	Bunting		Tidak Bunting	Bunting	Tidak Bunting
	Sekali IB	> Sekali IB			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sapi Potong	-	-	-	54,11	45,89
Sapi Perah	-	-	-	-	-
Kerbau	-	-	-	54,05	45,95
Kambing	-	-	-	77,14	22,86
Domba	-	-	-	75,49	24,51
Babi	-	-	-	90,70	9,30
Kuda	-	-	-	53,32	46,68

**Tabel 13. Rata-rata Produksi Telur menurut Jenis Unggas di Provinsi NTT Tahun 2007**

Jenis Unggas	Rata-rata Produksi/ ekor/tahun (Butir)	Rata-rata Jumlah Butir per Kilogram	Persentase Betina Produktif	Estimasi Produksi Telur (Ton)	
				2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ayam Buras	37,97	19,97	21,28	3 941	3 944
Ayam Ras Petelur	-	-	-	-	-
Itik/Itik Manila	117,14	13,08	56,23	851	554



**TABEL 15.a. PERSENTASE SAPI POTONG YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA USAHA  
PETERNAKAN PADA SAAT PENCAHAHAN MENURUT PROVINSI,  
KATEGORI UMUR DAN JENIS KELAMIN**

Provinsi	Anak			Muda			
	Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	8,55	5,79	14,34	19,70	12,69	0,05	32,44
2. Sumatera Utara	7,07	15,94	23,01	12,55	15,51	-	28,06
3. Sumatera Barat	5,37	5,76	11,13	6,56	20,81	-	27,37
4. Riau	9,68	10,34	20,02	13,45	13,69	0,03	27,17
5. Jambi	9,92	11,55	21,47	9,91	13,93	-	23,84
6. Sumatera Selatan	10,27	17,05	27,32	11,20	9,66	-	20,86
7. Bengkulu	12,99	15,97	28,96	7,52	14,53	-	22,05
8. Lampung	12,27	17,14	29,41	7,58	10,60	-	18,18
9. Bangka Belitung	7,47	9,12	16,59	2,07	16,21	-	18,28
10. Kepulauan Riau	8,85	12,51	21,36	14,52	13,45	-	27,97
11. DKI Jakarta	8,59	-	8,59	2,37	2,37	-	4,74
12. Jawa Barat	8,83	15,76	24,59	14,12	10,44	-	24,56
13. Jawa Tengah	11,04	13,00	24,04	13,82	12,32	0,09	26,23
14. DI Yogyakarta	11,69	11,79	23,48	14,71	12,93	-	27,64
15. Jawa Timur	9,27	8,98	18,25	19,60	11,71	-	31,31
16. Banten	4,64	11,57	16,21	14,79	14,85	-	29,64
17. Bali	13,07	13,23	26,30	11,78	9,89	0,13	21,80
18. Nusa Teng. Barat	8,94	15,22	24,16	11,58	14,75	0,03	26,36
19. Nusa Teng. Timur	7,62	11,36	18,98	10,04	13,42	0,03	23,49
20. Kalimantan Barat	6,61	16,63	23,24	17,83	11,31	0,02	29,16
21. Kalimantan Tengah	11,41	8,39	19,80	12,44	13,39	0,02	25,85
22. Kalimantan Selatan	23,43	16,05	39,48	17,96	3,31	-	21,27
23. Kalimantan Timur	10,34	12,77	23,11	9,42	13,49	-	22,91
24. Sulawesi Utara	7,40	8,08	15,48	8,55	10,78	0,15	19,48
25. Sulawesi Tengah	7,48	12,95	20,43	6,79	13,06	0,03	19,88
26. Sulawesi Selatan	10,19	10,92	21,11	14,21	17,43	0,29	31,93
27. Sulawesi Tenggara	8,84	14,68	23,52	8,65	15,51	-	24,16
28. Gorontalo	5,86	7,81	13,67	13,14	10,95	0,04	24,13
29. Sulawesi Barat	10,70	12,59	23,29	7,91	16,22	-	24,13
30. Maluku	8,57	12,93	21,50	8,33	12,64	-	20,97
31. Maluku Utara	9,72	9,29	19,01	10,59	16,62	-	27,21
32. Papua Barat	14,08	11,34	25,42	10,23	9,92	-	20,15
33. Papua	14,92	10,27	25,19	9,58	16,08	-	25,66
<b>Indonesia</b>	<b>9,72</b>	<b>11,59</b>	<b>21,31</b>	<b>14,59</b>	<b>12,71</b>	<b>0,04</b>	<b>27,34</b>

TABEL 15.a. LANJUTAN

Provinsi	Dewasa/Tua				Total			
	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	20,95	32,27	-	53,22	49,20	50,75	0,05	100,00
2. Sumatera Utara	9,45	39,40	0,08	48,93	29,07	70,85	0,08	100,00
3. Sum. Barat	14,00	47,50	-	61,50	25,93	74,07	-	100,00
4. Riau	13,21	39,45	0,15	52,81	36,34	63,48	0,18	100,00
5. Jambi	13,07	41,62	-	54,70	32,90	67,11	-	100,00
6. Sum. Selatan	8,74	43,08	-	51,83	30,21	69,80	-	100,00
7. Bengkulu	9,74	39,11	0,14	48,99	30,25	69,61	0,14	100,00
8. Lampung	7,97	44,44	-	52,41	27,82	72,18	-	100,00
9. Bangka Belitung	28,06	37,07	-	65,13	37,60	62,40	-	100,00
10. Kepulauan Riau	14,46	36,21	-	50,67	37,83	62,17	-	100,00
11. DKI Jakarta	75,70	10,97	-	86,67	86,66	13,34	-	100,00
12. Jawa Barat	12,77	38,06	0,02	50,85	35,72	64,26	0,02	100,00
13. Jawa Tengah	7,97	41,68	0,08	49,73	32,83	67,00	0,17	100,00
14. DI Yogyakarta	10,11	38,77	-	48,88	36,51	63,49	-	100,00
15. Jawa Timur	12,94	37,48	0,02	50,44	41,81	58,17	0,02	100,00
16. Banten	29,44	24,71	-	54,15	48,87	51,13	-	100,00
17. Bali	11,98	39,68	0,24	51,90	36,83	62,80	0,37	100,00
18. Nusa Teng. Barat	12,12	37,36	-	49,48	32,64	67,33	0,03	100,00
19. Nusa Teng. Timur	20,73	36,76	0,04	57,53	38,39	61,54	0,07	100,00
20. Kalimantan Barat	22,95	24,65	-	47,60	47,39	52,59	0,02	100,00
21. Kal. Tengah	19,16	35,19	-	54,35	43,01	56,97	0,02	100,00
22. Kal. Selatan	7,10	32,15	-	39,25	48,49	51,51	-	100,00
23. Kal. Timur	14,24	39,72	0,02	53,98	34,00	65,98	0,02	100,00
24. Sulawesi Utara	22,93	40,39	1,72	65,04	38,88	59,25	1,87	100,00
25. Sul. Tengah	15,32	40,43	3,94	59,69	29,59	66,44	3,97	100,00
26. Sul. Selatan	9,34	37,61	-	46,95	33,75	65,96	0,29	100,00
27. Sul. Tenggara	10,18	42,14	-	52,32	27,67	72,33	-	100,00
28. Gorontalo	15,19	46,99	0,02	62,20	34,19	65,75	0,06	100,00
29. Sul. Barat	7,02	45,56	-	52,58	25,63	74,37	-	100,00
30. Maluku	21,39	36,13	0,01	57,53	38,29	61,70	0,01	100,00
31. Maluku Utara	18,75	35,03	-	53,78	39,06	60,94	-	100,00
32. Papua Barat	13,07	41,36	-	54,43	37,38	62,62	-	100,00
33. Papua	14,05	35,10	-	49,15	38,55	61,45	-	100,00
<b>Indonesia</b>	<b>12,60</b>	<b>38,60</b>	<b>0,15</b>	<b>51,35</b>	<b>36,91</b>	<b>62,90</b>	<b>0,19</b>	<b>100,00</b>



**TABEL 15.b. LANJUTAN**

Provinsi	Dewasa/Tua				Total			
	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	13,30	37,26	-	50,56	34,78	65,22	-	100,00
2. Sumatera Utara	15,25	37,51	-	52,76	32,67	67,33	-	100,00
3. Sum. Barat	36,02	33,02	-	69,04	47,50	52,50	-	100,00
4. Riau	11,07	45,72	-	56,79	25,48	74,52	-	100,00
5. Jambi	13,17	37,42	-	50,59	35,21	64,79	-	100,00
6. Sum. Selatan	12,51	31,77	-	44,28	31,09	68,90	-	100,00
7. Bengkulu	9,19	38,97	-	48,16	34,71	65,29	-	100,00
8. Lampung	2,15	49,15	-	51,30	23,92	76,08	-	100,00
9. Bangka Belitung	25,00	50,00	-	75,00	48,08	51,92	-	100,00
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	100,00
11. DKI Jakarta	11,46	62,50	-	73,96	25,00	75,00	-	100,00
12. Jawa Barat	13,12	37,52	0,02	50,66	40,83	59,15	0,02	100,00
13. Jawa Tengah	10,94	44,82	-	55,76	32,76	67,25	-	100,00
14. DI Yogyakarta	11,21	45,34	-	56,55	29,69	70,32	-	100,00
15. Jawa Timur	7,39	34,17	-	41,56	24,29	75,71	-	100,00
16. Banten	13,65	42,59	0,02	56,26	32,68	67,30	0,02	100,00
17. Bali	-	73,48	-	73,48	14,02	85,98	-	100,00
18. Nusa Teng. Barat	4,94	37,16	0,23	42,33	29,55	70,08	0,38	100,00
19. Nusa Teng. Timur	9,15	51,83	0,09	61,07	27,34	72,57	0,09	100,00
20. Kalimantan Barat	12,83	39,71	-	52,54	28,93	71,07	-	100,00
21. Kal. Tengah	31,37	34,31	-	65,68	31,37	68,63	-	100,00
22. Kal. Selatan	14,07	35,25	-	49,32	33,59	66,41	-	100,00
23. Kal. Timur	34,56	30,35	-	64,91	51,30	48,70	-	100,00
24. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	100,00
25. Sul. Tengah	19,21	49,47	-	68,68	36,89	63,11	-	100,00
26. Sul. Selatan	17,06	41,80	0,77	59,63	36,65	62,58	0,77	100,00
27. Sul. Tenggara	18,41	43,37	-	61,78	31,76	68,25	-	100,00
28. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	100,00
29. Sul. Barat	15,45	46,27	-	61,72	31,85	68,15	-	100,00
30. Maluku	23,18	36,39	-	59,57	46,89	53,11	-	100,00
31. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	100,00
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	100,00
33. Papua	-	-	-	-	-	-	-	100,00
<b>Indonesia</b>	<b>13,54</b>	<b>40,26</b>	<b>0,08</b>	<b>53,88</b>	<b>33,33</b>	<b>66,57</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>



**TABEL 15.c. PERSENTASE KAMBING YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA USAHA  
PETERNAKAN PADA SAAT PENCACAHAN MENURUT PROVINSI,  
KATEGORI UMUR DAN JENIS KELAMIN**

Provinsi	Anak			Muda			
	Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	9,45	11,27	20,72	14,04	14,65	1,95	30,64
2. Sumatera Utara	8,02	20,38	28,40	11,04	15,98	0,04	27,06
3. Sumatera Barat	13,90	18,65	32,55	8,04	14,22	-	22,26
4. Riau	14,91	15,25	30,16	15,48	14,70	0,21	30,39
5. Jambi	15,20	15,68	30,88	8,15	13,50	-	21,65
6. Sumatera Selatan	12,22	18,55	30,77	8,33	16,30	-	24,63
7. Bengkulu	9,25	15,31	24,56	12,10	14,89	-	26,99
8. Lampung	18,80	21,47	40,27	8,35	8,72	-	17,07
9. Bangka Belitung	-	2,28	2,28	-	2,27	-	2,27
10. Kepulauan Riau	10,79	23,69	34,48	7,84	11,89	-	19,73
11. DKI Jakarta	12,16	20,46	32,62	8,15	13,34	-	21,49
12. Jawa Barat	10,03	17,10	27,13	8,98	16,05	0,03	25,06
13. Jawa Tengah	15,98	19,65	35,63	8,69	13,24	-	21,93
14. DI Yogyakarta	17,53	14,87	32,40	11,44	9,74	-	21,18
15. Jawa Timur	8,67	11,68	20,35	9,11	24,65	0,01	33,77
16. Banten	9,53	11,65	21,18	12,30	18,13	0,24	30,67
17. Bali	12,96	19,69	32,65	9,42	13,83	-	23,25
18. Nusa Teng. Barat	13,33	15,91	29,24	8,02	8,33	-	16,35
19. Nusa Teng. Timur	11,63	14,07	25,70	10,23	11,85	0,23	22,31
20. Kalimantan Barat	12,06	15,42	27,48	11,58	14,80	-	26,38
21. Kalimantan Tengah	15,42	17,25	32,67	11,39	12,94	-	24,33
22. Kalimantan Selatan	6,68	7,42	14,10	17,76	23,47	-	41,23
23. Kalimantan Timur	11,41	18,39	29,80	7,41	10,92	-	18,33
24. Sulawesi Utara	14,79	15,38	30,17	11,58	14,87	-	26,45
25. Sulawesi Tengah	13,41	16,58	29,99	8,03	12,33	0,09	20,45
26. Sulawesi Selatan	7,47	12,21	19,68	9,81	16,34	-	26,15
27. Sulawesi Tenggara	11,54	14,09	25,63	11,88	19,85	-	31,73
28. Gorontalo	8,67	9,03	17,70	13,23	15,00	-	28,23
29. Sulawesi Barat	13,49	17,57	31,06	6,96	11,76	-	18,72
30. Maluku	10,00	14,71	24,71	14,37	11,80	-	26,17
31. Maluku Utara	14,57	17,16	31,73	13,53	14,05	0,01	27,59
32. Papua Barat	12,31	9,99	22,30	7,95	8,87	-	16,82
33. Papua	7,14	11,20	18,34	15,26	20,02	-	35,28
<b>Indonesia</b>	<b>12,37</b>	<b>15,82</b>	<b>28,19</b>	<b>9,61</b>	<b>16,37</b>	<b>0,06</b>	<b>26,04</b>

TABEL 15.c. LANJUTAN

	Provinsi	Dewasa/Tua				Total			
		Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	NAD	17,03	30,70	0,91	48,64	40,52	56,62	2,86	100,00
2.	Sumatera Utara	9,28	35,26	-	44,54	28,34	71,62	0,04	100,00
3.	Sum. Barat	13,96	31,23	-	45,19	35,90	64,10	-	100,00
4.	Riau	12,62	26,59	0,24	39,45	43,01	56,54	0,45	100,00
5.	Jambi	14,85	32,62	-	47,47	38,20	61,80	-	100,00
6.	Sum. Selatan	13,63	30,19	0,78	44,60	34,18	65,04	0,78	100,00
7.	Bengkulu	15,38	33,07	-	48,45	36,73	63,27	-	100,00
8.	Lampung	13,20	29,46	-	42,66	40,35	59,65	-	100,00
9.	Bangka Belitung	28,75	66,70	-	95,45	28,75	71,25	-	100,00
10.	Kepulauan Riau	15,74	30,05	-	45,79	34,37	65,63	-	100,00
11.	DKI Jakarta	16,48	29,32	0,09	45,89	36,79	63,12	0,09	100,00
12.	Jawa Barat	14,26	33,47	0,08	47,81	33,27	66,62	0,11	100,00
13.	Jawa Tengah	9,52	32,92	-	42,44	34,19	65,81	-	100,00
14.	DI Yogyakarta	18,19	28,23	-	46,42	47,16	52,84	-	100,00
15.	Jawa Timur	20,84	25,02	0,02	45,88	38,62	61,35	0,03	100,00
16.	Banten	16,12	31,31	0,72	48,15	37,95	61,09	0,96	100,00
17.	Bali	7,48	36,62	-	44,10	29,86	70,14	-	100,00
18.	Nusa Teng. Barat	27,79	26,60	0,02	54,41	49,14	50,84	0,02	100,00
19.	Nusa Teng. Timur	14,85	34,02	3,12	51,99	36,71	59,94	3,35	100,00
20.	Kalimantan Barat	14,13	32,01	-	46,14	37,77	62,23	-	100,00
21.	Kal. Tengah	10,49	32,51	-	43,00	37,30	62,70	-	100,00
22.	Kal. Selatan	18,14	26,53	-	44,67	42,58	57,42	-	100,00
23.	Kal. Timur	16,52	35,35	-	51,87	35,34	64,66	-	100,00
24.	Sulawesi Utara	18,88	24,50	-	43,38	45,25	54,75	-	100,00
25.	Sul. Tengah	12,71	36,69	0,16	49,56	34,15	65,60	0,25	100,00
26.	Sul. Selatan	16,72	37,45	-	54,17	34,00	66,00	-	100,00
27.	Sul. Tenggara	9,53	33,11	-	42,64	32,95	67,05	-	100,00
28.	Gorontalo	21,09	32,98	-	54,07	42,99	57,01	-	100,00
29.	Sul. Barat	11,42	38,80	-	50,22	31,87	68,13	-	100,00
30.	Maluku	20,78	28,33	0,01	49,12	45,15	54,84	0,01	100,00
31.	Maluku Utara	14,14	26,53	0,01	40,68	42,24	57,74	0,02	100,00
32.	Papua Barat	18,18	42,70	-	60,88	38,44	61,56	-	100,00
33.	Papua	18,31	28,07	-	46,38	40,71	59,29	-	100,00
	<b>Indonesia</b>	<b>15,64</b>	<b>29,91</b>	<b>0,22</b>	<b>45,77</b>	<b>37,62</b>	<b>62,10</b>	<b>0,28</b>	<b>100,00</b>

**TABEL 15.d. PERSENTASE DOMBA YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA USAHA  
PETERNAKAN PADA SAAT PENCACAHAN MENURUT PROVINSI,  
KATEGORI UMUR DAN JENIS KELAMIN**

Provinsi	Anak			Muda			
	Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	10,65	10,37	21,02	15,03	14,57	-	29,60
2. Sumatera Utara	13,69	14,11	27,80	8,76	12,27	-	21,03
3. Sumatera Barat	12,50	18,75	31,25	25,00	12,50	-	37,50
4. Riau	16,90	4,05	20,95	15,19	20,91	-	36,10
5. Jambi	11,46	12,42	23,88	14,17	16,72	-	30,89
6. Sumatera Selatan	15,13	16,38	31,51	7,67	16,15	-	23,82
7. Bengkulu	33,48	1,36	34,84	4,07	1,36	-	5,43
8. Lampung	10,92	10,85	21,77	19,50	19,51	-	39,01
9. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	8,26	20,62	28,88	14,43	14,43	-	28,86
12. Jawa Barat	14,37	13,02	27,39	13,52	13,18	0,01	26,71
13. Jawa Tengah	10,50	16,45	26,95	7,51	15,72	-	23,23
14. DI Yogyakarta	10,10	24,87	34,97	7,69	11,62	-	19,31
15. Jawa Timur	13,29	21,47	34,76	7,70	15,52	0,09	23,31
16. Banten	11,81	14,50	26,31	10,66	15,85	-	26,51
17. Bali	-	-	-	-	-	-	-
18. Nusa Teng. Barat	14,80	14,95	29,75	5,39	17,61	-	23,00
19. Nusa Teng. Timur	16,37	13,13	29,50	10,32	17,25	0,06	27,63
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	0,68	5,10	5,78	10,20	20,41	-	30,61
23. Kalimantan Timur	50,00	-	50,00	-	8,06	-	8,06
24. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	15,09	11,38	26,47	1,25	5,93	-	7,18
26. Sulawesi Selatan	-	-	-	33,33	66,67	-	100,00
27. Sulawesi Tenggara	9,29	13,27	22,56	17,65	17,65	-	35,30
28. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	13,34	13,33	26,67	6,67	13,33	-	20,00
31. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
33. Papua	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indonesia</b>	<b>13,37</b>	<b>15,20</b>	<b>28,57</b>	<b>11,24</b>	<b>14,27</b>	<b>0,02</b>	<b>25,53</b>

**TABEL 15.d. LANJUTAN**

	Provinsi	Dewasa/Tua				Total			
		Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	NAD	17,26	32,12	-	49,38	42,94	57,06	-	100,00
2.	Sumatera Utara	15,80	35,37	-	51,17	38,25	61,75	-	100,00
3.	Sum. Barat	6,25	25,00	-	31,25	43,75	56,25	-	100,00
4.	Riau	16,74	26,21	-	42,95	48,83	51,17	-	100,00
5.	Jambi	13,15	32,08	-	45,23	38,78	61,22	-	100,00
6.	Sum. Selatan	11,03	33,64	-	44,67	33,83	66,17	-	100,00
7.	Bengkulu	15,84	43,89	-	59,73	53,39	46,61	-	100,00
8.	Lampung	16,17	23,05	-	39,22	46,59	53,41	-	100,00
9.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	100,00
10.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	100,00
11.	DKI Jakarta	16,49	25,77	-	42,26	39,18	60,82	-	100,00
12.	Jawa Barat	14,19	31,68	0,03	45,90	42,08	57,88	0,04	100,00
13.	Jawa Tengah	14,40	35,38	0,04	49,82	32,41	67,55	0,04	100,00
14.	DI Yogyakarta	7,75	37,97	-	45,72	25,54	74,46	-	100,00
15.	Jawa Timur	8,29	33,46	0,18	41,93	29,28	70,45	0,27	100,00
16.	Banten	12,09	35,09	-	47,18	34,56	65,44	-	100,00
17.	Bali	-	-	-	-	-	-	-	100,00
18.	Nusa Teng. Barat	9,22	38,03	-	47,25	29,41	70,59	-	100,00
19.	Nusa Teng. Timur	15,35	25,02	2,50	42,87	42,04	55,40	2,56	100,00
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	100,00
21.	Kal. Tengah	-	-	-	-	-	-	-	100,00
22.	Kal. Selatan	17,69	45,92	-	63,61	28,57	71,43	-	100,00
23.	Kal. Timur	-	41,94	-	41,94	50,00	50,00	-	100,00
24.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	100,00
25.	Sul. Tengah	15,36	50,99	-	66,35	31,70	68,30	-	100,00
26.	Sul. Selatan	-	-	-	-	33,33	66,67	-	100,00
27.	Sul. Tenggara	18,58	23,56	-	42,14	45,52	54,48	-	100,00
28.	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	100,00
29.	Sul. Barat	-	-	-	-	-	-	-	100,00
30.	Maluku	20,00	33,33	-	53,33	40,01	59,99	-	100,00
31.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	100,00
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	100,00
33.	Papua	-	-	-	-	-	-	-	100,00
	<b>Indonesia</b>	<b>13,22</b>	<b>32,57</b>	<b>0,11</b>	<b>45,90</b>	<b>37,83</b>	<b>62,04</b>	<b>0,13</b>	<b>100,00</b>



TABEL 15.e. LANJUTAN

Provinsi	Dewasa/Tua				Total			
	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2. Sumatera Utara	9,25	20,38	23,25	52,88	27,81	42,86	29,33	100,00
3. Sum. Barat	22,76	35,71	-	58,47	38,13	61,87	-	100,00
4. Riau	10,74	26,30	-	37,04	34,98	65,02	-	100,00
5. Jambi	-	-	-	-	-	-	-	100,00
6. Sum. Selatan	13,58	12,15	13,78	39,51	23,41	43,51	33,08	100,00
7. Bengkulu	15,27	31,30	-	46,57	36,25	63,75	-	100,00
8. Lampung	13,20	25,65	-	38,85	37,26	62,74	-	100,00
9. Bangka Belitung	5,57	22,52	-	28,09	20,57	71,79	7,64	100,00
10. Kepulauan Riau	11,67	25,23	-	36,90	33,31	66,69	-	100,00
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	100,00
12. Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	100,00
13. Jawa Tengah	3,49	22,40	1,09	26,98	21,05	73,33	5,62	100,00
14. DI Yogyakarta	1,58	31,02	-	32,60	5,57	92,16	2,27	100,00
15. Jawa Timur	6,26	11,06	-	17,32	35,32	58,42	6,26	100,00
16. Banten	3,89	35,70	-	39,59	18,41	43,23	40,36	100,00
17. Bali	6,52	12,03	6,82	25,37	30,95	40,83	28,22	100,00
18. Nusa Teng. Barat	59,29	13,08	-	72,37	73,14	25,26	1,60	100,00
19. Nusa Teng. Timur	11,93	27,76	4,83	44,52	35,32	54,02	10,66	100,00
20. Kalimantan Barat	9,98	19,61	1,36	30,95	36,52	56,33	7,15	100,00
21. Kal. Tengah	18,12	26,73	0,28	45,13	50,53	48,88	0,59	100,00
22. Kal. Selatan	11,85	20,47	-	32,32	35,45	64,55	-	100,00
23. Kal. Timur	17,59	21,60	0,13	39,32	50,03	49,58	0,39	100,00
24. Sulawesi Utara	4,16	14,70	1,73	20,59	42,30	52,41	5,29	100,00
25. Sul. Tengah	13,05	21,45	0,39	34,89	38,08	54,42	7,50	100,00
26. Sul. Selatan	14,59	10,35	7,67	32,61	54,74	33,96	11,30	100,00
27. Sul. Tenggara	8,70	23,30	0,17	32,17	38,60	61,23	0,17	100,00
28. Gorontalo	1,66	18,33	-	19,99	42,67	57,33	-	100,00
29. Sul. Barat	10,22	21,08	8,76	40,06	39,20	43,53	17,27	100,00
30. Maluku	21,47	22,12	0,04	43,63	52,70	47,20	0,10	100,00
31. Maluku Utara	20,38	22,01	0,30	42,69	49,42	50,16	0,42	100,00
32. Papua Barat	10,90	25,25	0,46	36,61	30,16	69,38	0,46	100,00
33. Papua	14,92	21,61	4,43	40,96	38,47	54,00	7,53	100,00
<b>Indonesia</b>	<b>12,10</b>	<b>21,62</b>	<b>6,36</b>	<b>40,08</b>	<b>37,33</b>	<b>50,41</b>	<b>12,26</b>	<b>100,00</b>

**TABEL 15.F. PERSENTASE KUDA YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA USAHA  
PETERNAKAN PADA SAAT PENCACAHAN MENURUT PROVINSI,  
KATEGORI UMUR DAN JENIS KELAMIN**

	Provinsi	Anak			Muda			Jumlah
		Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	(1)						(8)	
1.	NAD	12,18	12,19	24,37	12,26	12,19	-	24,45
2.	Sumatera Utara	4,28	8,85	13,13	12,21	24,68	-	36,89
3.	Sumatera Barat	-	-	-	22,16	-	-	22,16
4.	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
6.	Sumatera Selatan	-	10,56	10,56	10,56	10,56	-	21,12
7.	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8.	Lampung	-	12,76	12,76	12,75	12,75	-	25,50
9.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
10.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	10,60	10,61	21,21	10,61	31,82	-	42,43
13.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
14.	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
15.	Jawa Timur	-	-	-	17,97	-	-	17,97
16.	Banten	-	-	-	-	-	-	-
17.	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18.	Nusa Teng. Barat	10,36	13,01	23,37	9,28	12,94	-	22,22
19.	Nusa Teng. Timur	8,68	12,78	21,46	6,65	7,86	0,30	14,81
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
24.	Sulawesi Utara	8,70	7,46	16,16	1,70	10,47	-	12,17
25.	Sulawesi Tengah	19,67	4,13	23,80	2,27	1,74	-	4,01
26.	Sulawesi Selatan	6,18	6,19	12,37	6,91	8,53	-	15,44
27.	Sulawesi Tenggara	-	12,65	12,65	16,36	4,72	-	21,08
28.	Gorontalo	6,87	15,63	22,50	6,25	16,25	-	22,50
29.	Sulawesi Barat	-	0,65	0,65	0,31	0,94	-	1,25
30.	Maluku	8,42	1,46	9,88	4,78	19,54	-	24,32
31.	Maluku Utara	-	-	-	31,74	-	-	31,74
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	50,00	-	50,00
	<b>Indonesia</b>	<b>7,38</b>	<b>8,82</b>	<b>16,20</b>	<b>7,00</b>	<b>9,71</b>	<b>0,08</b>	<b>16,79</b>

**TABEL 15.f. LANJUTAN**

Provinsi	Dewasa/Tua				Total			
	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah	Jantan	Betina	Kebiri	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	26,81	24,37	-	51,18	51,25	48,75	-	100,00
2. Sumatera Utara	15,33	34,65	-	49,98	31,82	68,18	-	100,00
3. Sum. Barat	55,68	22,16	-	77,84	77,84	22,16	-	100,00
4. Riau	-	-	-	-	-	-	-	100,00
5. Jambi	-	-	-	-	-	-	-	100,00
6. Sum. Selatan	-	68,32	-	68,32	10,56	89,44	-	100,00
7. Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	100,00
8. Lampung	-	61,74	-	61,74	12,75	87,25	-	100,00
9. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	100,00
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	100,00
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	100,00
12. Jawa Barat	15,15	21,21	-	36,36	36,36	63,64	-	100,00
13. Jawa Tengah	42,99	57,01	-	100,00	42,99	57,01	-	100,00
14. DI Yogyakarta	40,00	60,00	-	100,00	40,00	60,00	-	100,00
15. Jawa Timur	-	82,03	-	82,03	17,97	82,03	-	100,00
16. Banten	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
17. Bali	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
18. Nusa Teng. Barat	14,85	39,49	0,07	54,41	34,49	65,44	0,07	100,00
19. Nusa Teng. Timur	25,11	38,24	0,38	63,73	40,44	58,88	0,68	100,00
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	100,00
21. Kal. Tengah	-	-	-	-	-	-	-	100,00
22. Kal. Selatan	20,00	80,00	-	100,00	20,00	80,00	-	100,00
23. Kal. Timur	-	-	-	-	-	-	-	100,00
24. Sulawesi Utara	36,98	34,23	0,46	71,67	47,38	52,16	0,46	100,00
25. Sul. Tengah	45,74	26,45	-	72,19	67,68	32,32	-	100,00
26. Sul. Selatan	44,73	27,46	-	72,19	57,82	42,18	-	100,00
27. Sul. Tenggara	13,66	52,61	-	66,27	30,02	69,98	-	100,00
28. Gorontalo	26,25	28,75	-	55,00	39,37	60,63	-	100,00
29. Sul. Barat	28,61	69,49	-	98,10	28,92	71,08	-	100,00
30. Maluku	33,99	31,81	-	65,80	47,19	52,81	-	100,00
31. Maluku Utara	36,51	31,75	-	68,26	68,25	31,75	-	100,00
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	100,00
33. Papua	-	50,00	-	50,00	-	100,00	-	100,00
<b>Indonesia</b>	<b>31,87</b>	<b>35,02</b>	<b>0,12</b>	<b>67,01</b>	<b>46,25</b>	<b>53,55</b>	<b>0,20</b>	<b>100,00</b>

**TABEL 15.g. PERSENTASE AYAM BURAS YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA USAHA  
PETERNAKAN PADA SAAT PENCACAHAN MENURUT PROVINSI,  
KATEGORI UMUR DAN JENIS KELAMIN**

Provinsi	Anak			Muda		
	Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	10,37	14,43	24,80	14,03	19,23	33,26
2. Sumatera Utara	10,80	22,72	33,52	9,93	17,56	27,49
3. Sumatera Barat	8,66	23,35	32,01	5,90	21,78	27,68
4. Riau	15,06	17,13	32,19	18,74	18,80	37,54
5. Jambi	14,79	23,68	38,47	12,96	19,17	32,13
6. Sumatera Selatan	13,13	21,95	35,08	11,65	23,78	35,43
7. Bengkulu	15,13	26,47	41,60	9,13	18,49	27,62
8. Lampung	19,82	22,49	42,31	12,68	14,21	26,89
9. Bangka Belitung	11,06	22,27	33,33	11,84	25,40	37,24
10. Kepulauan Riau	15,34	21,24	36,58	11,99	18,73	30,72
11. DKI Jakarta	7,93	22,98	30,91	8,84	19,08	27,92
12. Jawa Barat	13,90	26,99	40,89	14,60	24,09	38,69
13. Jawa Tengah	13,26	24,73	37,99	12,48	21,50	33,98
14. DI Yogyakarta	11,83	30,48	42,31	7,89	27,78	35,67
15. Jawa Timur	8,29	16,33	24,62	8,94	25,99	34,93
16. Banten	15,76	24,03	39,79	14,01	19,42	33,43
17. Bali	23,19	16,51	39,70	11,31	13,45	24,76
18. Nusa Teng. Barat	10,36	18,78	29,14	9,14	22,59	31,73
19. Nusa Teng. Timur	16,88	24,14	41,02	10,67	16,24	26,91
20. Kalimantan Barat	13,88	21,23	35,11	13,79	23,12	36,91
21. Kalimantan Tengah	14,48	21,43	35,91	10,19	17,30	27,49
22. Kalimantan Selatan	17,71	23,59	41,30	9,77	16,08	25,85
23. Kalimantan Timur	15,75	19,39	35,14	15,94	18,71	34,65
24. Sulawesi Utara	17,76	24,66	42,42	17,82	23,70	41,52
25. Sulawesi Tengah	14,57	22,05	36,62	10,90	18,17	29,07
26. Sulawesi Selatan	10,54	22,23	32,77	11,28	21,26	32,54
27. Sulawesi Tenggara	16,71	24,38	41,09	13,44	18,80	32,24
28. Gorontalo	12,86	24,49	37,35	11,06	19,64	30,70
29. Sulawesi Barat	13,72	21,24	34,96	13,55	20,78	34,33
30. Maluku	17,26	17,79	35,05	15,30	17,17	32,47
31. Maluku Utara	14,77	18,79	33,56	17,48	21,22	38,70
32. Papua Barat	16,96	20,88	37,84	15,61	17,30	32,91
33. Papua	13,88	19,69	33,57	15,35	21,63	36,98
<b>Indonesia</b>	<b>12,98</b>	<b>21,42</b>	<b>34,40</b>	<b>11,85</b>	<b>21,19</b>	<b>33,04</b>



TABEL 15.g. LANJUTAN

Provinsi	Dewasa/Tua			Total		
	Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	12,39	29,55	41,94	36,79	63,21	100,00
2. Sumatera Utara	8,14	30,85	38,99	28,87	71,13	100,00
3. Sumatera Barat	10,46	29,85	40,31	25,02	74,98	100,00
4. Riau	11,11	19,16	30,27	44,91	55,09	100,00
5. Jambi	8,38	21,02	29,40	36,13	63,87	100,00
6. Sumatera Selatan	9,44	20,05	29,49	34,22	65,78	100,00
7. Bengkulu	8,64	22,14	30,78	32,90	67,10	100,00
8. Lampung	10,83	19,97	30,80	43,33	56,67	100,00
9. Bangka Belitung	7,37	22,06	29,43	30,27	69,73	100,00
10. Kepulauan Riau	7,57	25,13	32,70	34,90	65,10	100,00
11. DKI Jakarta	8,64	32,53	41,17	25,41	74,59	100,00
12. Jawa Barat	6,51	13,91	20,42	35,01	64,99	100,00
13. Jawa Tengah	7,45	20,58	28,03	33,19	66,81	100,00
14. DI Yogyakarta	6,10	15,92	22,02	25,82	74,18	100,00
15. Jawa Timur	8,21	32,24	40,45	25,44	74,56	100,00
16. Banten	9,38	17,40	26,78	39,15	60,85	100,00
17. Bali	9,62	25,92	35,54	44,12	55,88	100,00
18. Nusa Teng. Barat	9,38	29,75	39,13	28,88	71,12	100,00
19. Nusa Teng. Timur	10,79	21,28	32,07	38,34	61,66	100,00
20. Kalimantan Barat	9,86	18,12	27,98	37,53	62,47	100,00
21. Kalimantan Tengah	11,58	25,02	36,60	36,25	63,75	100,00
22. Kalimantan Selatan	10,97	21,88	32,85	38,45	61,55	100,00
23. Kalimantan Timur	11,54	18,67	30,21	43,23	56,77	100,00
24. Sulawesi Utara	6,53	9,53	16,06	42,11	57,89	100,00
25. Sulawesi Tengah	11,12	23,19	34,31	36,59	63,41	100,00
26. Sulawesi Selatan	9,13	25,56	34,69	30,95	69,05	100,00
27. Sulawesi Tenggara	9,55	17,12	26,67	39,70	60,30	100,00
28. Gorontalo	10,43	21,52	31,95	34,35	65,65	100,00
29. Sulawesi Barat	10,56	20,15	30,71	37,83	62,17	100,00
30. Maluku	16,14	16,34	32,48	48,70	51,30	100,00
31. Maluku Utara	10,82	16,92	27,74	43,07	56,93	100,00
32. Papua Barat	11,57	17,68	29,25	44,14	55,86	100,00
33. Papua	11,56	17,89	29,45	40,79	59,21	100,00
<b>Indonesia</b>	<b>9,25</b>	<b>23,31</b>	<b>32,56</b>	<b>34,08</b>	<b>65,92</b>	<b>100,00</b>

**TABEL 15.h. PERSENTASE ITIK/ITIK MANIL YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA  
USAHA PETERNAKAN PADA SAAT PENCACAHAN MENURUT PROVINSI,  
KATEGORI UMUR DAN JENIS KELAMIN**

Provinsi	Anak			Muda		
	Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	5,19	8,25	13,44	10,52	17,14	27,66
2. Sumatera Utara	1,86	4,21	6,07	11,74	18,54	30,28
3. Sumatera Barat	1,07	6,96	8,03	2,06	14,77	16,83
4. Riau	8,02	12,85	20,87	6,27	16,93	23,20
5. Jambi	11,01	17,27	28,28	6,87	13,96	20,83
6. Sumatera Selatan	8,28	16,18	24,46	5,10	10,30	15,40
7. Bengkulu	6,35	8,36	14,71	3,42	10,47	13,89
8. Lampung	7,87	17,96	25,83	6,29	14,66	20,95
9. Bangka Belitung	5,36	9,14	14,50	11,92	29,97	41,89
10. Kepulauan Riau	0,45	3,24	3,69	5,17	61,50	66,67
11. DKI Jakarta	1,92	17,59	19,51	1,77	4,38	6,15
12. Jawa Barat	3,34	8,11	11,45	4,04	2,29	6,33
13. Jawa Tengah	5,20	19,67	24,87	2,57	13,34	15,91
14. DI Yogyakarta	2,13	4,84	6,97	1,85	16,35	18,20
15. Jawa Timur	8,64	14,26	22,90	5,31	22,41	27,72
16. Banten	5,53	12,20	17,73	6,50	18,10	24,60
17. Bali	4,91	23,61	28,52	4,16	29,21	33,37
18. Nusa Teng. Barat	6,90	11,33	18,23	16,66	28,84	45,50
19. Nusa Teng. Timur	10,92	-	10,92	10,49	8,13	18,62
20. Kalimantan Barat	7,01	13,86	20,87	3,78	11,44	15,22
21. Kalimantan Tengah	3,33	6,38	9,71	5,65	16,69	22,34
22. Kalimantan Selatan	1,21	7,74	8,95	0,88	4,25	5,13
23. Kalimantan Timur	12,42	10,69	23,11	8,16	14,14	22,30
24. Sulawesi Utara	6,79	15,30	22,09	5,69	15,20	20,89
25. Sulawesi Tengah	5,40	8,31	13,71	9,04	3,54	12,58
26. Sulawesi Selatan	2,58	6,38	8,96	4,62	7,75	12,37
27. Sulawesi Tenggara	4,46	10,92	15,38	5,44	12,29	17,73
28. Gorontalo	3,87	6,66	10,53	9,08	23,25	32,33
29. Sulawesi Barat	3,10	10,81	13,91	2,95	21,31	24,26
30. Maluku	9,05	10,32	19,37	1,01	17,17	18,18
31. Maluku Utara	11,00	16,46	27,46	9,32	15,04	24,36
32. Papua Barat	4,43	4,77	9,20	4,54	4,77	9,31
33. Papua	0,14	0,10	0,24	4,15	22,69	26,84
<b>Indonesia</b>	<b>4,44</b>	<b>12,58</b>	<b>17,02</b>	<b>4,04</b>	<b>11,87</b>	<b>15,91</b>

TABEL 15.h. LANJUTAN

	Provinsi	Dewasa/Tua			Total		
		Jantan	Betina	Jumlah	Jantan	Betina	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	NAD	15,49	43,41	58,90	31,20	68,80	100,00
2.	Sumatera Utara	8,97	54,68	63,65	22,57	77,43	100,00
3.	Sumatera Barat	7,45	67,69	75,14	10,58	89,42	100,00
4.	Riau	9,02	46,91	55,93	23,31	76,69	100,00
5.	Jambi	9,44	41,45	50,89	27,32	72,68	100,00
6.	Sumatera Selatan	9,83	50,31	60,14	23,21	76,79	100,00
7.	Bengkulu	11,98	59,42	71,40	21,75	78,25	100,00
8.	Lampung	8,36	44,86	53,22	22,52	77,48	100,00
9.	Bangka Belitung	13,35	30,26	43,61	30,63	69,37	100,00
10.	Kepulauan Riau	2,92	26,72	29,64	8,54	91,46	100,00
11.	DKI Jakarta	3,75	70,59	74,34	7,44	92,56	100,00
12.	Jawa Barat	3,31	78,91	82,22	10,69	89,31	100,00
13.	Jawa Tengah	3,12	56,10	59,22	10,89	89,11	100,00
14.	DI Yogyakarta	6,31	68,52	74,83	10,29	89,71	100,00
15.	Jawa Timur	3,36	46,02	49,38	17,31	82,69	100,00
16.	Banten	8,31	49,36	57,67	20,34	79,66	100,00
17.	Bali	2,32	35,79	38,11	11,39	88,61	100,00
18.	Nusa Teng. Barat	5,34	30,93	36,27	28,90	71,10	100,00
19.	Nusa Teng. Timur	14,23	56,23	70,46	35,64	64,36	100,00
20.	Kalimantan Barat	12,87	51,04	63,91	23,66	76,34	100,00
21.	Kalimantan Tengah	8,43	59,52	67,95	17,41	82,59	100,00
22.	Kalimantan Selatan	4,85	81,07	85,92	6,94	93,06	100,00
23.	Kalimantan Timur	12,95	41,64	54,59	33,53	66,47	100,00
24.	Sulawesi Utara	9,45	47,57	57,02	21,93	78,07	100,00
25.	Sulawesi Tengah	12,99	60,72	73,71	27,43	72,57	100,00
26.	Sulawesi Selatan	17,19	61,48	78,67	24,39	75,61	100,00
27.	Sulawesi Tenggara	9,76	57,13	66,89	19,66	80,34	100,00
28.	Gorontalo	11,05	46,09	57,14	24,00	76,00	100,00
29.	Sulawesi Barat	6,76	55,07	61,83	12,81	87,19	100,00
30.	Maluku	17,37	45,08	62,45	27,43	72,57	100,00
31.	Maluku Utara	11,20	36,98	48,18	31,52	68,48	100,00
32.	Papua Barat	25,98	55,51	81,49	34,95	65,05	100,00
33.	Papua	10,48	62,44	72,92	14,77	85,23	100,00
	<b>Indonesia</b>	<b>6,18</b>	<b>60,89</b>	<b>67,07</b>	<b>14,66</b>	<b>85,34</b>	<b>100,00</b>

<https://ntt.bps.go.id>

